

**TINDAKAN SOSIAL AKTOR PEMERINTAH DESA
DALAM SERTIFIKASI TANAH
(Studi Pada Pemerintahan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo
Kabupaten Malang)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



**Disusun Oleh :
CAHYO BUDIMAN
NIM : 201710270211004**

**DIREKTORAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020**

**TINDAKAN SOSIAL AKTOR PEMERINTAH DESA DALAM
SERTIFIKASI TANAH
(STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA SUMBEROTO,
KECAMATAN DONOMULYO, KABUPATEN MALANG)**

Diajukan oleh :

**CAHYO BUDIMAN
201710270211004**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Jum'at/ 24 Januari 2020

Pembimbing Utama



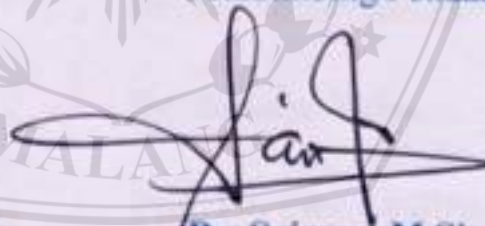
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.

Direktur
Program Pascasarjana



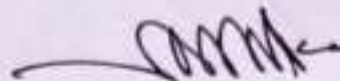
Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Saiman, M.Si.

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi



Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

CAHYO BUDIMAN
201710270211004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/17 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si.

Sekretaris : Dr. Saiman, M.Si.

Penguji I : Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si.

Penguji II : Dr. Oman Sukmana, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CAHYO BUDIMAN

NIM : 201710270211004

Program Studi : Magister Sosiologi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **TINDAKAN SOSIAL AKTOR PEMERINTAH DESA DALAM SERTIFIKASI TANAH** (Studi pada Pemerintahan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang) adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2020

Yang menyatakan,



CAHYO BUDIMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan karuniannya sehingga Tesis dengan judul Tindakan Sosial Aktor Pemerintah Desa Dalam Sertifikasi Tanah (Studi Pada Pemerintahan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang) sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang telah berhasil diselesaikan.

Selama penyusunan Tesis ini mulai dari perencanaan sampai penyelesaian penulisan laporan banyak pihak yang turut membantu baik moril maupun materiil. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya Tesis ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Pertama Kepada diri saya sendiri yang telah sabar dan berpikir radikal dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang secara ikhlas mendoakan, membimbing dan memberikan semangat demi terselesaikannya Tesis ini.
3. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi
5. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan terselesaikannya Tesis ini.
6. Dr. Saiman, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi motivasi dan arahan demi terselesaikannya Tesis ini.
7. Kepala Desa Sumberoto beserta perangkatnya yang bersedia memberikan data sebagai bagian dari kebutuhan penelitian ini.
8. Serta orang-orang terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung dalam menempuh studi magister.

Penyusunan Tesis ini penulis sadar masih banyak kekurangan. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum. Sehingga Tesis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

Malang, 24 Januari 2020

Cahyo Budiman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
KAJIAN PUSTAKA	
Teori Tindakan Sosial	5
Konsep Desa	8
Konsep Desa	9
Sertifikasi dalam Pembaruan Agraria	10
Penelitian Terdahulu	11
METODE PENELITIAN	
Paradigma Penelitian	17
Pendekatan dan Jenis Penelitian	17
Lokasi dan Subyek Penelitian	18
<i>Subyek Penelitian</i>	19
<i>Sumber Data/Informasi Penelitian</i>	20
Tehnik Pengumpulan Data	20
Tehnik Analisis Data	21
Pengecekan Keabsahan Data	23
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	
Kondisi Alam dan Administrasi Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang	23
Penduduk dan Kehidupan Sosial-Budaya	24
Ekonomi Lokal Masyarakat desa Sumberoto	26
Pelapisan Sosial Masyarakat Desa Sumberoto	27
Sertifikasi Tanah di Desa Sumberoto	28
Rasionalisasi Pemerintah Desa	32
PENUTUP	
Kesimpulan	42
Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

1. Anatomi Penelitian Terdahulu	14
2. Jenis penggunaan tanah di Desa Sumberoto tahun 2019	27
3. Sertifikasi di Desa Sumberoto	29
4. Kepemilikan Tanah Warga Desa Sumberoto	31



DAFTAR GAMBAR

1. Alur Pemikiran Distribusi Tanah	12
2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberoto Tahun 2019	20
3. Penggambaran Pemfokusan Data Penelitian yang Ditampilkan	21
4. Alur Analisis Data	22
5. Tindakan Sosial Pemerintahan Desa	36



**Tindakan Sosial Aktor Pemerintah Desa Dalam Sertifikasi Tanah
(Studi Pada Pemerintahan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo
Kabupaten Malang).**

Cahyo Budiman

Cahyo.budiman.87@outlook.com

Dr. Tri Sulistyoningsih, M.Si (NIDN. 0022066401)

Dr. Saiman, M.Si. (NIDN. 0029096602)

Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Permasalahan agraria di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat tanah. Sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Proses pengurusan tanah berjalan secara sporadis dilakukan oleh pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). Desa Sumberoto merupakan salah satu desa yang melaksanakan PTSL di tahun 2019. Urgensi dari adanya program PTSL di Desa Sumberoto tidaklah mendesak, namun Pemerintah Desa bersikeras mengadakan program ini. Hal ini menimbulkan konflik selama proses sertifikasi massal. Adapun hal yang menarik dalam fenomena PTSL adalah bagaimana tindakan pemerintah desa dalam proses sertifikasi massal ini ? Pemikiran Rasional seperti apakah yang melandasi pemikiran pemerintah desa ? Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab, alasan dan alur rasionalisasi pemerintah desa dalam terselenggaranya program PTSL Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tindakan sosial yang didasari oleh rasionalisasi dari aktor-aktor yang bertindak. Tindakan sosial terbagi ke dalam empat tipe yaitu *Zwerk Rational (Tindakan Rasionalitas Instrumetal)*, *Werktrational action (Tindakan Rasional Nilai)*, *Traditional action (Tindakan Tradisional)*, *Affectual action (Tindakan Afektual)*. Penelitian ini menggunakan penggunaan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan paradigma definisi sosial yang mencakup pemaknaan dari individu sebagai aktor yang sadar dengan tindakan yang mereka lakukan. Metode observasi, wawancara, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berwujud dalam catatan lapangan yang direduksi, dideskripsikan dan ditafsirkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan *Zwerk Rational (Tindakan Rasionalitas Instrumetal)* merupakan tindakan yang dominan dilakukan oleh aktor pemerintahan desa yang di dalamnya terdapat orientasi atau kepentingan. Pemerintahan berupaya memperbaiki administrasi, terutama dalam bidang pertanahan yang memberikan kerugian secara finansial bagi aktor pemerintahan desa. Pengambilan program sertifikasi ini tidak terlepas dari adanya kepentingan kelompok untuk dapat menguasai politik di Desa. Rasionalisasi yang dijalankan oleh aktor pemerintah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik.

Kata Kunci : Tindakan Sosial, Aktor, Rasionalisasi, Sertifikasi Tanah

**Social Actions of Village Government Actors in Land Certification
(Study in Sumberoto Village Government, Donomulyo District,
Malang Regency).**

Cahyo Budiman

Cahyo.budiman.87@outlook.com

Dr. Tri Sulistyoningsih, M.Si (NIDN. 0022066401)

Dr. Saiman, M.Si. (NIDN. 0029096602)

Masters in Sociology, University of Muhammadiyah Malang.

Malang, East Java, Indonesia

ABSTRACT

The agrarian problem in Indonesia is caused by the low level of ownership of land certificates. Land certificate as legal proof of land ownership. The land management process is carried out sporadically by the government through the Systematic Complete Land Registration program (hereinafter referred to as PTSL). Sumberoto Village is one of the villages that implemented PTSL in 2019. The urgency of the PTSL program in Sumberoto Village was not urgent, but the Village Government insisted on holding this program. This caused conflict during the mass certification process. The interesting in the PTSL phenomenon is how is the action of the village government in the mass certification process? What kind of rational thinking underlies the thinking of the village government? The research carried out aims to describe the causes, reasons and flow of rationalization of the village government in the implementation of the PTSL program. The theoretical approach used in this study includes social action based on the rationalization of the acting actors. Social action is divided into four types, namely Zwerk Rational (Instrumental Rationality Actions), Werktrational action (Rational Value Actions), Traditional actions (Traditional Actions), Affectual actions (Intellectual Actions). This study uses the use of a phenomenological qualitative approach with a social definition paradigm that includes the meaning of individuals as actors who are aware of the actions they take. Methods of observation, interviews, documentation studies are used to analyze data obtained from tangible fieldwork in reduced, described and interpreted field notes. The research show that the Zwerk Rational Act (Instrumental Rationality Act) is the dominant action taken by village government actors in which there is orientation or interest. The government seeks to improve administration, especially in the area of land which gives financial losses to village government actors. Taking the certification program is inseparable from the interests of groups to be able to master politics in the village. Rationalization carried out by government actors is influenced by economic and political factors.

Keywords: Social Actions, Actors, Rationalization, Land Certification

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya legalitas tanah memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. Permasalahan ini memunculkan konflik vertikal dan horizontal. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (2017:4-5), terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017, konflik agraria di Indonesia mencapai 1.361 konflik dengan luasan wilayah konflik mencapai 520.491,87 Ha yang melibatkan 652.738 KK.

Permasalahan tanah di Indonesia cenderung meningkat semenjak tidak diterapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) secara serius. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya penerapan UUPA yang berbeda-beda dalam setiap rezim, mulai dari Rezim Orde Lama yang bernuansa sosialis dan Orde Baru yang bernuansa propasar (Rachman, 2016). Efeknya dalam kurun waktu 32 tahun (1966-1998), terjadi maladministrasi sistem pertanahan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan lebih mementingkan kepentingan pasar yang berorientasi pada penumpukan kapital dari mendatangkan investor asing. Kondisi inilah yang memicu konflik agraria yang berkepanjangan. Konflik pertanahan lebih banyak terjadi di daerah perdesaan yang merupakan pusat dari sumber daya alam (SDA). Kondisi ini diperparah belum selesainya implementasi hukum agraria secara penuh karena pergantian rezim yang mendadak dan ideologi yang berlawanan. Faktor lain penyebab masalah konflik pertanahan adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami hukum agraria, yang merupakan hasil dari sosialisasi hukum agraria yang tidak berhasil dari Negara untuk rakyat.

Hukum Agraria ini berkaitan dengan hak rakyat menguasai obyek agraria atau hak masyarakat dalam mengolah SDA, termasuk hak dalam memiliki tanah. Penerapan hukum agraria harus diikuti dengan adanya pembaruan agraria, seperti redistribusi tanah dan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah. Redistribusi tanah adalah membagikan tanah yang dikuasai oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukti legalitas kepemilikan tanah diwujudkan dalam bentuk sertifikat tanah yang di dalamnya tertera luasan tanah, batas tanah hingga peta bidang tanah. Menyoal permasalahan kepemilikan SDA dari Negara salah satunya kepemilikan tanah, berpeluang memunculkan permasalahan sosial. Maka dari itu, bukti kepemilikan tanah ini diatur secara jelas oleh negara, bahkan ini sudah diatur sejak masa kolonial Belanda. Kondisi ini sebagai upaya nyata dalam mengatasi munculnya konflik akibat proses legalitas kepemilikan tanah yang tak jarang memunculkan permasalahan sosial yang berkepanjangan. Langkah legalitas tanah di Indonesia masih memerlukan waktu yang panjang. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, jumlah tanah yang baru tersertifikasi sebanyak 40 juta bidang (Sofyan Djalil, 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tanah yang dikuasai oleh masyarakat belum tersertifikasi secara baik di BPN. Kondisi ini disebabkan oleh proses pembuatan sertifikat memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar (Sutedi, 2012:65), karena di dalamnya terdapat instrumen-instrumen yang penting, mulai dari pengukuran hingga pengarsipan, sehingga pada setiap tahapannya dalam pengurusan sertifikat tanah diperlukan adanya tenaga-tenaga ahli dalam penyelesaiannya. Permasalahan ini diperkeruh dengan adanya pihak birokrasi yang memperumit proses pengurusan legalitas tanah. Kondisi inilah yang menyebabkan urgensi kepemilikan sertifikat tanah menjadi dikesampingkan oleh masyarakat awal. Padahal dengan mempunyai sertifikat tanah, maka masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam kepemilikan dan pengolahan SDA dan terhindar dari konflik agraria yang kerap merugikan rakyat.

Permasalahan dalam proses pemerataan legalitas tanah di Indonesia ini direspon oleh pemerintah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, pemerintah menjalankan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan program PTSL melibatkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Tingkat Provinsi hingga tingkat desa.

Peraturan pemerintah dalam hal pengurusan sertifikat mengacu pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendataan tanah yang lebih komprehensif menjadikan masyarakat secara berkala mendapat kepastian hukum atas aset yang dikuasai. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA tahun 1960, menerangkan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang “kuat”, artinya: harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. Maka dari itu, secara awam proses sertifikasi massal ini dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat terutama dalam hal kepastian hukum kepemilikan.

PTSL ini didukung oleh Undang-Undang No 6 tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UUD Desa). UUD Desa dibuat agar pemerintah desa agar dapat mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri karena sifatnya yang menganut sistem desentralisasi, yaitu pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola daerah dan masyarakatnya, karena masyarakat dan pemerintahan daerah lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Program sertifikasi tanah massal atau PTSL yang diperkuat dengan UUD Desa, berpeluang memunculkan permasalahan sosial. UUD Desa yang dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pemerintah daerah menjadi alat yang kuat untuk pihak-pihak yang hendak mensukseskan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Aktor pemerintah desa menjadi salah satu pihak yang berpotensi dalam mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah yang dijalankan. Menurut Permatasari (2018), setiap kebijakan yang ada di pemerintah desa mengakibatkan terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu. Fenomena permasalahan sosial yang muncul dari sertifikasi adalah terbaginya dua kubu masyarakat, pertama mereka yang menerima dan mereka yang melakukan penolakan terhadap tindakan pemerintah desa mengenai sertifikasi ini.

Program PTSL merupakan sebuah tindakan yang tepat dari pemerintah pusat, jika dalam proses sertifikasi diawali dengan pemetaan yang komprehensif sebelum “dikunci” dengan sertifikat. UUPA yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era Orde Lama sebelum pada tahapan sertifikasi, tim lapangan melakukan pemetaan, sehingga hasil yang dikeluarkan bukan hanya sekedar pemetaan tanah melainkan juga dalam bentuk redistribusi tanah secara langsung, sehingga menghindarkan munculnya tuan tanah, meskipun di dalam redistribusi tersebut memunculkan konflik horizontal (Rachman, 2016). Maka dari itu, pemerintah memberikan atensi yang lebih dalam hal sertifikat tanah ini.

Sertifikasi dapat menjadi salah satu alat politik pemerintah. Paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa dalam setiap rezim pemerintahan mempunyai kepentingan, baik pusat maupun daerah. Rezim orde lama yang “seolah” dekat dengan paham komunis menjadikan kebijakannya lebih condong pada kepentingan rakyat, sedangkan pada Rezim orde baru lebih melekat pada kepentingan pasar yang berupaya dalam mencoba mempermudah pihak asing dalam memiliki dan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kondisi ini sedikit bergeser setelah era reformasi yang lebih bersifat Bottom-Up dalam setiap proses yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dengan tujuan untuk penataan agraria yang lebih sistematis dan mendapat raport baik dalam pemerintahan, meskipun tetap memunculkan konflik agraria. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pembaruan agraria ini tidak terlepas dari adanya kepentingan dari pemerintah.

Program PTSL merupakan sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah pusat yang penerima program ini sudah ditentukan pelaksana program di daerah. Beberapa daerah di Jawa Timur telah melakukan Prona (Program Nasional) sertifikasi salah satunya Desa Sumberoto. Pada tahun 2017 Prona di Sumberoto berjalan dengan lancar, dan pada tahun 2018, pihak pemerintah desa mengajukan desanya untuk ikut dalam program PTSL.

Menelaah urgensi dari kepemilikan sertifikat, hal tersebut tidak disadari oleh semua pemerintah desa. Akibatnya program sertifikasi ini tidak serta merta diterima oleh pemerintah desa. Seperti pada kasus pemerintah Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Pemerintahan Desa Tempursari tidak menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah pusat karena pemerintah desa tersebut merasa belum siap dalam menjalankan program. Ketidaksiapan ini meliputi masalah administrasi di desanya. Faktor lainnya adalah sebagian besar wilayah desa Tempursari merupakan bekas dari perkebunan di masa penjajahan Belanda.

Tidak diambilnya program PTSL oleh pemerintahan desa Tempursari direspon oleh pemerintah Desa Sumberoto. Pemerintah desa Sumberoto bersedia mengambil program PTSL ini meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi pengarsipan tanah di Desa tersebut tidaklah baik dan cenderung memunculkan konflik agraria, baik vertikal maupun horizontal (Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara, 2015). Kondisi ini ditunjukkan adanya permasalahan tanah antara masyarakat dengan pihak Yayasan ini, dan ini tidak melibatkan sedikit orang.

Fenomena yang muncul dari pengambilalihan “jatah” PTSL dari Desa Tempursari ini menjadi suatu hal yang menarik. Program yang dijalankan pemerintah bersifat Top-Down, namun yang terjadi di lapangan adalah program ini beralih ke Desa yang pada dasarnya tidak mempunyai permasalahan tanah sepele Desa Tempursari. Jika dipahami lebih lanjut tentu saja hal ini tidak dapat dipisahkan dari intervensi dari anggota pemerintah desa. Intervensi dalam mengambil “jatah” PTSL ini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman aktor pemerintah desa mengenai urgensi sertifikasi tanah ini atau ada muatan tujuan di balik tindakan yang diambil.

Pemahaman aktor desa ini yang perlu penafsiran mendalam. Kondisi meliputi bahwa aktor desa tidak bergerak secara bebas, melainkan masih terdapat bias status di pemerintah desa. Aktor pemerintah desa ini dapat masuk lebih jauh dalam setiap lini kehidupan masyarakat perdesaan. Akibatnya pemaknaan aktor pemerintah desa ini dimaknai luas oleh masyarakat sehingga memunculkan penerimaan dan penolakan dari masyarakat.

Makna di balik tindakan pemerintah Desa Sumberoto tidak dapat hanya dilakukan dengan cara pengamatan, melainkan harus dilakukan pemaknaan mendalam dari tindakan yang diambil oleh aktor pemerintah desa. Menurut Weber (dalam Ritzer, 2016:37) tindakan sosial masyarakat merupakan sebuah tindakan yang penuh arti yaitu di dalam setiap tindakannya individu-individu ini mempunyai tujuan, baik dikarenakan keinginan personal maupun keinginan institusi atau sistem sosial yang melingkupi individu tersebut. Menurut Migdal (2004) tentang bahasan *State in Society*, menunjukkan bahwa selama ini bahasan tentang pemerintah desa menjadi dua komunitas berbeda, padahal pemerintah desa tersebut berkembang dan bekerja di dalam masyarakat. Pemaknaan pemerintah desa di sini merupakan

perwakilan individu namun mempunyai dua status, pertama sebagai *society* dan sebagai *State* itu sendiri.

Kasus yang terjadi di Desa Sumberoto menunjukkan bahwa masyarakat merupakan makhluk yang dinamis dan sentiasa mengkonstruksi makna dalam setiap kegiatannya. Lebih jauh menurut Cresswell (2018:32), individu-individu secara aktif berusaha memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja. Kata bekerja ini dikaitkan tindakan dari pemerintah desa, meskipun secara nyata mereka bekerja untuk pemerintah, namun di satu sisi mereka merupakan individu aktif yang tumbuh atas pemaknaan-pemaknaan yang melingkupinya selama hidup dan pengaruh kelompoknya bernaung. Bias makna bukan hanya tentang subyek penelitian, melainkan juga dari si peneliti dalam memandang tindakan aktor pemerintah desa.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tindakan sosial aktor pemerintah desa dalam sertifikasi tanah di desa Sumberoto ? Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses tindakan sosial pemerintah desa dalam sertifikasi tanah di Desa Sumberoto. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan empirik yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dalam upaya pemerintahan desa dalam pembaharuan agraria. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan konsep keilmuan yang baru dalam pemahaman tentang tindakan sosial pemerintahan desa dalam pembaharuan agraria. Penelitian ini dapat menjadi landasan berpikir untuk penelitian selanjutnya. Selain manfaat teoritis, terdapat manfaat praktis dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan tindakan sosial pemerintahan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial berkaitan dengan tingkat rasionalitas dari masing-masing individu. Setiap tipe ini mempunyai muatan-muatan nilai yang berbeda. Weber melihat tindakan sosial ini bukan selalu mengenai perilaku individu, melainkan bagaimana individu-individu yang ada melakukan tindakannya dengan sadar dan penuh akan makna (Ritzer, 2016). Weber menjelaskan bahwa dalam tindakannya aktor melakukan hal tersebut dengan penuh kesungguhan dan keberadaan peneliti mencoba memahami dan menyelami pengalaman aktor. Tipe-tipe tindakan sosial menurut Weber adalah :

1. *Zwerk Rational (Tindakan Rasionalitas Instrumental)*

Merupakan sebuah tindakan sosial murni dimana aktor tidak hanya menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya melainkan menentukan nilai dari tujuan tersebut. Nilai menjadi acuan utama dalam setiap kegiatan, maka dari inilah keberadaan kegiatan yang terlihat dengan maksud terkadang tidaklah seirama. Di sinilah diperlukan pemahaman yang mendalam yaitu dengan cara menyelami pemahaman aktor.

Tindakan yang dilakukan aktor ditekankan oleh adanya norma-norma sosial yang melingkupi tindakan-tindakan yang diambil. Tindakan yang dihasilkan tidak serta merta tanpa alasan, melainkan ada pertimbangan rasionalitas yang melibatkan aktor lain dimana instrumen yang digunakan juga ada muatan nilai. Instrumen dan nilai menjadi sebuah rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Karena instrumen yang digunakan tidak sesuai maka hasil pemaknaan ini juga akan berbeda dan menghasilkan nilai yang berbeda.

2. *Werktrational action (Tindakan Rasional Nilai)*

Dalam tindakan sosial ini, aktor dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Tipe kedua ini, tindakan sosial yang diambil oleh aktor tidak serasional yang pertama dimana tujuan yang ada dapat berubah sesuai dengan kondisi dan dapat dipahami.

Nilai-nilai yang dianut oleh aktor tidaklah tunggal, atau dapat diartikan bahwa aktor ini mempunyai tujuan ganda. Maka dari inilah rasionalitas yang diusung lebih menekankan pada nilai. Beda dengan *Zwerk Rational* dimana instrumen menjadi faktor utama dalam mengejar nilai, sedangkan untuk *Werktrational* ini lebih pada inti dari tindakan, bukan tentang instrumen.

3. *Affectual action (Tindakan Afektual)*

Tindakan sosial yang dipengaruhi oleh perasaan emosi si aktor. Rasionalitas tidak menjadi indikator penting dalam tindakan yang diambil oleh si aktor. Nilai yang terkandung dalam tindakan yang diambil hanya dibatasi pemahaman antara si aktor dengan aktor yang terkena tindakan sosial.

4. *Traditional action (Tindakan Tradisional)*

Merupakan sebuah tindakan sosial yang dilakukan tanpa adanya pikiran ulang, dan lebih dekat pada kegiatan sehari-hari. Tindakan tradisional ini tidak diperhatikan begitu mendalam karena nilai dan instrumen yang digunakan tidaklah bermakna lebih. Bukan berarti mereka tidak memaknai, namun karena lazim dipergunakan sehingga tindakan dan nilai yang terkandung dalam tindakan tersebut melebur.

Keempat tipe di atas merupakan salah satu bentuk tindakan sosial masyarakat dalam merespon keberadaan dari individu lain. Dalam kacamata ini, meletakkan individu-individu merupakan aktor aktif yang tidak hanya dikekang oleh sistem atau pranata sosial yang ada. Dalam studi kasus yang diangkat, tindakan pemerintahan desa Sumberoto mengadakan pembaharuan agraria sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk dari empat dari tindakan sosial yang ada. Masyarakat secara penuh menyadari tujuan dari tindakannya.

Berbicara tentang teori tindakan sosial yang dicetuskan oleh Max Weber, hal yang sangat ditekankan adalah *Verstehen* (dalam Ritzer, 2012:199). *Verstehen* merupakan langkah yang diambil seorang sosiolog untuk dapat memahami sesuatu fenomena dengan sangat mendetail yaitu dengan melakukan memahami secara penuh fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Pemahaman ini tidak terlepas pada apa yang terlihat melainkan melibatkan pihak-pihak yang masuk dalam fenomena tersebut. Kemudian keberadaan Sosiolog sebagai pihak yang melakukan penafsiran dari apa yang terjadi dalam fenomena tersebut.

Weber dalam memahami suatu fenomena tidak terlepas dari adanya kausalitas. Kausalitas ini merupakan langkah dimana peneliti maupun sosiolog berupaya untuk mengungkapkan bahwa pada dasarnya fenomena sosial itu terjadi karena adanya peristiwa dan sebagai bentuk awal dari adanya fenomena (dalam Ritzer, 2012:201). Dengan kata lain, dalam menggunakan teori ini maka sosiolog tidak dapat mengenyampingkan kondisi historis dari suatu tempat yang sedang diteliti. Pendekatan historis dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai latar belakang awal dalam melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Weber memberi penekanan bahwa sebenarnya dalam setiap masyarakat, keberadaan negara menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, dalam setiap tindakan yang diambil pemerintah dilakukan secara sadar, meskipun hasil yang hendak dicapai terkadang tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Lebih jauh, Weber (dalam Ritzer, 2012:205) menekankan bahwa pada dasarnya terdapat empat penyebab munculnya penyimpangan yang dilakukan pemerintah :

1. Tindakan para birokrat yang berangkat atau termotivasi dari data atau informasi yang salah
2. Kesalahan strategi yang diambil oleh birokrat.
3. Keputusan yang dibuat berdasar pada emosi, bukan dengan pemikiran yang matang
4. Masih terdapat pemikiran irasional yang melatarbelakangi munculnya tindakan, contohnya tindakan para pemimpin yang didukung mati-matian oleh pendukungnya tanpa berpikir secara rasional.

Berbicara tentang Rasionalitas, Weber menempatkan pemikiran tersendiri dalam memahami rasionalitas. Pola pikir yang mengedepankan rasionalitas ini sebelumnya telah ditelaah lebih jauh oleh Weber dalam kajiannya. Weber (dalam Ritzer 2012:231-236) menempatkan bahwa rasionalitas itu sendiri mempunyai berbagai tipe dan sifatnya. Tipe rasionalitas yang dimaksud Weber adalah rasionalitas Praktis, rasionalitas Teoritis, rasionalitas Substantif dan rasionalitas Formal. Rasionalitas praktis lebih pada pemikiran pragmatis dari individu, rasionalitas teoritis menekankan pada taraf kognisi yang dalam pengaplikasiannya masih menimbulkan kontradiksi, kemudian rasionalitas substantif lebih pada penggabungan rasionalitas teoritis dan praktis, yaitu dari segi sistem nilai menekankan pada rasionalitas teoritis, namun untuk mencapai tujuan menggunakan pendekatan rasionalitas praktis. Sedangkan yang terakhir adalah rasionalitas formal, dimana dalam mencapai tujuan, perhitungan serta alat yang digunakan benar-benar diukur, dimana rasionalitas ini biasanya dipergunakan untuk para kaum birokratis.

Lebih jauh, dalam mengkaji rasionalitas, maka Ritzer (2012:236) lebih menekankan pada dua tipe rasionalitas yaitu rasionalitas substantif dan rasionalitas formal. Rasionalitas formal lebih ditekankan pada enam sifat dasarnya : 1) kalkulabilitas, 2) efisiensi, 3) prediktabilitas, 4) mereduksi tenaga manusia, 5) dapat dikendalikan, dan 6) dapat memetakan konsekuensi irrasional. Keenam sifat ini sangat kental dalam kegiatan birokrasi. Hasil dari rasionalitas formal tidak menekankan pada hasil dari pilihan tersebut, namun lebih menekankan proses pengambilan pilihan. Hal ini bertentangan dengan rasionalitas Substantif, dimana rasionalitas ini diambil untuk memenuhi tujuan tertentu.

Konsep Desa

Pemahaman desa menurut Rachman (2016) adalah berupa sistem pemerintahan tidak serta merta dapat menjalankan rumah tangganya secara bebas, karena Desa merupakan unit terkecil Negara, maka intervensi Negara tentu saja masih kuat, bahkan ketingkat privat. Kondisi ini menjadi titik masuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat mengendalikan wilayah desa secara penuh dan sesuai dengan rancangan Negara.

Secara definisi, pemahaman desa terbagi dalam berbagai lingkup. *Pertama*, secara Sosiologi, merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, secara ekonomi sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. *Ketiga*, Desa diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang

secara politis mempunyai kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara (Baca Maschab, 2013:1-2). Konseptual tentang desa ini menggambarkan terdapat tiga kunci utama yaitu : Ekonomi yang seragam, perpanjangan tangan Negara dan lokasi yang relatif mempunyai kesamaan kontur. Pemahaman Perdesaan tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang No 06 tahun 2014 dibuat agar pemerintah desa agar dapat mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri. Otonomi penuh melingkupi setiap kebijakan pemerintahan Desa sekarang ini. Meskipun demikian tetap ada intervensi dari pemerintah.

Pada kajian Anderson (2008) perihal bagaimana pemaknaan daerah tidak dapat dipisahkan dari konstruksi dari pemerintah. Pada masa Orde Baru, Desa tidak lebih dari daerah otonomi sasaran pembangunan yang dibayangkan sebagai daerah yang masyarakat tak jauh lebih pintar dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Desa lebih dibayangkan sebagai unit terkecil dari Bangsa sehingga ketika berbicara tentang Desa secara tak sadar akan mengarahkan kepada daerah yang terbelakang, masyarakat yang homogen, masyarakat miskin serta pemerintahan yang korup.

Pemahaman ini menyambung dengan pemahaman Chambers (1988), yang dimana pada dasarnya masyarakat perkotaan melihat desa itu tidak sebagai kesatuan yang berbeda dari perkotaan, dan standar yang digunakan adalah standar kota, sehingga yang terlihat adalah kemiskinan menjadi hal yang menonjol, sehingga pembangunan menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Padahal Desa mempunyai sistem sendiri yang tidak sama dengan kota serta standar yang ada juga tidak sama dengan kota.

Pada masa globalisasi ini, sulit memisahkan daerah desa dan kota. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin cepatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilisasi masyarakat dari desa dan kota. Menurut Abdullah (2006) dimana menunjukkan bahwa, Desa telah menjelma dari *Bounded System* ke *Borderless Society*. Sehingga Desa tidak dapat dilihat dari sebuah teritori terpisah dari kota. Sehingga Desa dan Kota hanya sebatas pada wilayah administrasi yang jika dilihat sekarang maka, pemaknaan desa dan kota sudah kabur karena batas wilayah ini hanya terdapat dalam bayang-bayang.

Konsep Aktor

Konsep aktor yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Aktor menurut Coleman. Berlandaskan grand theory dari Weber mengenai rasionalitas atau lebih spesifiknya adalah tindakan dari individu diawali dengan adanya pemikiran rasional, sehingga perspektif konsep aktor yang bertindak dilatar belakang oleh rasionalitas . Tataran seperti yang dikemukakan oleh Coleman ini, mengkaji kapital sosial secara khusus, dan representasi kapital secara umum dari sudut pandang Sosiologi. Pergerakan aktor dalam suatu struktur tidak dapat

dipisahkan dari kepentingan ekonomi bagi kepentingan kelompoknya meskipun hal ini hanya bias struktur sosial. Pada dasarnya sebelum menjadi anggota di dalam struktur aktor tersebut merupakan aktor dalam masyarakat baik aktif maupun pasif.

Maka dalam pemahaman aktor dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori tindakan rasional. Tindakan rasional ada beberapa kata kunci yang harus dikaitkan satu dengan yang lainnya, yakni aktor (yang diasumsikan rasional); pilihan dari beragam sumber yang tersedia; penguasaan atas sumber-sumber itu oleh si aktor; dan kepentingan pribadi. Coleman berasumsi bahwa individu perlu dipertimbangkan, karena aktor yang memiliki dalam tanda petik “mesin tindakan”. Menurut Coleman, individu manusia bukan hanya sekedar tempat ataupun media bagi bekerjanya suatu struktur sosial. Aktor itu dibentuk tidak sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan (sistem atau struktur), aktor bersifat aktif, serta memiliki kekuatan dari dalam untuk menentukan tindakannya.

Mengacu pada pemahaman aktor oleh Coleman, Migdal (2004) dalam kajiannya juga menjelaskan bahwa adanya bias status menjadi hal yang utama penyebab keberadaan aktor dalam pemerintah bergerak atas dasar strukturnya. Padahal pada dasarnya aktor pemerintah tidak sepenuhnya menjadi agen pemerintah, melainkan mereka juga anggota masyarakat. Selain itu, adanya pemikiran rasional dari aktor pemerintahan yang mereka sendiri mempunyai cara pandang khusus dalam fenomena di depannya.

Pengalaman atau *Stock of Knowledge* dari Individu aktor pemerintah menjadikan corak dalam pemerintahan yang terkadang menimbulkan konflik atau menimbulkan sebuah pemikiran baru yang mempengaruhi pola pergerakan pemerintah desa. Penelitian ini menampilkan posisi dari pemerintah desa juga merupakan aktor aktif dalam suatu struktur. Pengalaman serta rasionalitas aktor menjadi mesin tindakan sosial di dalam pemerintahan desa. Bagaimana ketika mereka menjadi anggota *ruling class* dipengaruhi oleh pengalaman sebelum menjadi aktor pemerintah yang kerap dialienasikan oleh aktor di luar struktur.

Sertifikasi dalam Pembaruan Agraria

Sertifikasi Tanah merupakan sebuah rangkaian panjang dari pembaruan agraria. Sertifikat yang merupakan bentuk akhir dari proses penyerahan kuasa pengelolaan sumber daya alam dari Negara kemudian dikelola oleh masyarakat sipil. Sertifikasi merupakan proses membuat sertifikat untuk masyarakat yang merupakan bagian dari pembaruan agraria. Pembaruan Agraria secara konsep dapat dipahami sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang berkaitan dengan penataan kembali penguasaan, penggunaan, kepemilikan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan serta keadilan dan kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia (pasal

2), dan membedakannya dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya, dimana dalam pengelolaan sumber daya alam yang dalam pemahaman ini adalah tanah melalui beberapa tahapan hukum yang menjadikan tanah menjadi obyek yang dapat dimiliki dan dikelola oleh masyarakat umum. Pemahaman ini merupakan hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan No IX/2001 pada November 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dengan mana Presiden Indonesia dan DPR RI diberi mandat untuk melaksanakan seperangkat arah kebijakan pembaruan agraria dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

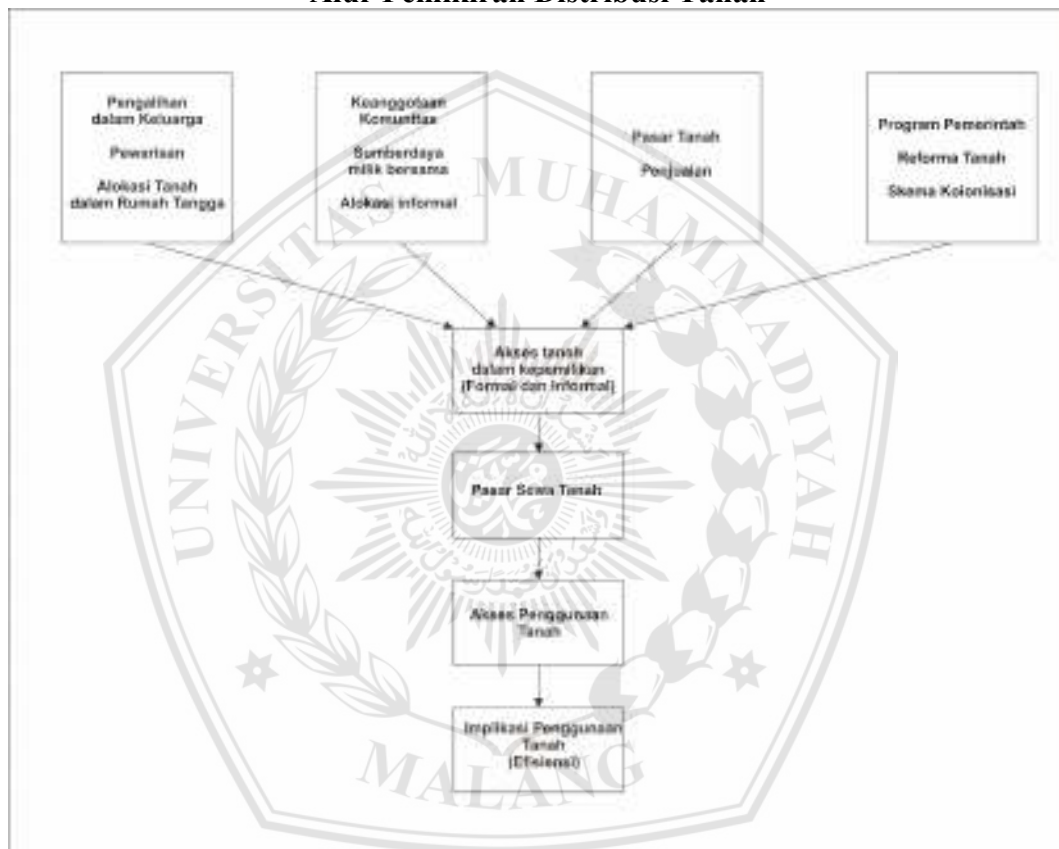
Maria S.W. Sumardjono (dalam Arizona, 2014:475) memahami bahwa tindakan pembaruan agraria yang pada intinya adalah: (1) Suatu proses yang berkesinambungan; (2) Berkenaan dengan restrukturisasi pemilikan/penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria) oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan; (3) Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria), serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berbicara tentang pembaruan Agraria mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (selanjutnya disebut UUPA), yaitu makna kata “agraria” mengacu pada semua sumber daya alam, meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (UUPA (1) 2). Dalam konteks ini, kata agraria memiliki makna yang cukup penting karena terkait dengan pengelolaan dan penguasaan atas tanah dan sumber-sumber daya alam tersebut di atas, juga pengaturan hukum atas penguasaan dan proses memungut hasilnya. Oleh karena pemaknaan hukum yang luas tersebut maka tulisan ini hanya akan membahas soal penguasaan dan pemanfaatan tanah, khususnya tanah pertanian, sebagai hak dasar kaum tani serta konsekuensi-konsekuensinya. Undang-undang tersebut menyatakan keadilan agraria adalah dasar bagi ekonomi nasional yang akan membawa pada keadilan sosial. Pernyataan tersebut juga dimasukkan dalam ketetapan MPRS No. II/1960 Pasal 4(3), yang menyatakan *land reform* adalah dasar bagi pembangunan semesta, yang berarti pembangunan di segala bidang.

Menurut Wiradi dan Bachriadi (2011), terdapat dua pandangan tentang UUPA yang saling bertolak belakang. Pandangan pertama melihat UUPA sebagai peraturan pokok yang masih membutuhkan aturan-aturan turunan, dan karenanya setiap penyelewengan terjadi karena adanya penyimpangan interpretasi oleh pemegang kekuasaan dan birokrasi. Penyimpangan interpretasi berpengaruh besar dalam proses pembaruan agraria di Indonesia. Pandangan kedua melihat bahwa justru isi UUPA yang bermasalah karena memperkuat prinsip-prinsip hak menguasai negara. Hak menguasai atas negara ini bermasalah pada bagaimana masyarakat menyikapi kepemilikannya atas obyek negara, terutama tanah.

Berstein (2008:119) menggambarkan bahwa tujuan pembaruan agraria tidak terlepas dari bentuk kediktatoran negara. Keberadaan UUPA menjadikan negara lebih leluasa dalam meredistribusikan tanah kembali dikuasai oleh masyarakat. Efisiensi penggunaan tanah menjadi salah satu hal yang diutamakan. Namun tidak dapat disangkal bahwa efisiensi tanah ini dihadapkan pada kepentingan kelompok atau bahkan politik. Lebih parahnya efisiensi ini juga terhalang oleh faktor kultural di dalam keluarga.

Gambar 1.
Alur Pemikiran Distribusi Tanah



Sumber: Bernstein, 2008

Pemahaman pembaruan agraria menurut Shohibuddin (2016) merupakan sebuah upaya mewujudkan demokratisasi relasi-relasi sosio-agraria yang timpang dan eksploitatif, dengan pemihakan nyata kepada kelompok miskin, sekaligus menjamin keadilan antar-generasi. Akses dan pemanfaatan ini mencakup hubungan penguasaan, sewa menyewa dan bagi hasil atas suatu sumber agraria, beserta hubungan perburuhan dan kemitraan yang terjadi dalam proses produksi dan penciptaan surplus di atasnya berikut pembagiannya.

Rachman (2017) pembaruan agraria ini tidak terbatas pada sertifikasi terhadap obyek pembaruan agraria semata, namun juga mencakup *tenancy reform*, *labour reform*, dan bahkan *business reform* atas berbagai skema kemitraan (inti-plasma, *contract farming*, sertifikasi, dan lain-lain) yang melibatkan petani dengan para pelaku bisnis lain. Pembaruan Agraria adalah suatu pembaruan menyeluruh yang diarahkan untuk memulihkan krisis agraria dan ekologi, kondisi ini menjawab konsep awal pemahaman mendasar bahwa pembaruan agraria yaitu “fungsi sosial” tanah yang ditegaskan dalam UU Pokok Agraria tidak hanya berarti “fungsi keadilan” untuk menjawab krisis agraria, namun juga mencakup “fungsi keberlanjutan” untuk mengatasi krisis ekologi.

Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan sekarang ini bukanlah penelitian baru, maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu. Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada penelitian yang membahas tentang cara pandang masyarakat terhadap tanahnya serta legalitas yang dimilikinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh E.O. Thontteh & M.M Omirin, tentang ‘*Land Registration Within the Framework of Land Administration Reform in Lagos State*’ bahwa pendaftaran tanah memiliki peran dalam menciptakan keteraturan di dalam Negara, karena dengan terpetakan wilayahnya berarti telah memetakan permasalahan tanah kedepannya. Berdasarkan temuannya, dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikasi. Namun hal yang membedakan adalah pemerintah diartikan hanya sebagai Negara, namun pada dasarnya pemerintah desa merupakan sama-sama orang desa yang mempunyai pemahaman yang berbeda, karena berada di titik liminal.

Kajian berikutnya yang berkaitan dengan sertifikasi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Klaus Deininger, Daniel Ayalew Ali, Stein Holden, Jaap Zevenbergen dalam ‘*Rural Land Certification in Ethiopia: Process, Initial Impact, and Implications for Other African Countries*’. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat menjadi awal peningkatan perekonomian untuk rumah tangga dengan pendapatan rendah. Keberadaan sertifikat menegaskan batas teritori dari suatu suku. Pada penelitian yang saya dilakukan ini, sama-sama mengulas bagaimana program pendaftaran sertifikat tanah digunakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Carrol Warren dalam ‘*Legal Certainty for Whom? Land Contestation and Value Transformations at Gili Trawangan, Lombok*’. Temuannya, menunjukkan bahwa kepastian hukum

merupakan hal yang penting, karena pada kasus yang terjadi di Gili Trawangan, keberadaan sertifikat menjadi benteng terakhir dalam mengamankan ranah privat yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kaitannya sertifikat sebagai bentuk politik, yang dalam kasus di Gili Trawangan, dengan munculnya sertifikat tanah, maka semakin mudahnya tanah itu lepas, karena kepastian hukum yang ada telah mengikat. Kondisi ini membuat masyarakat yang sebelumnya mempunyai tanah yang luas, perlahan namun pasti akan melepasnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sertifikat tanah memang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Namun dalam penelitian Warren, pemerintahan desa menjadi satu pihak juga sebagai agen antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini banyak menekankan pada aktor pemerintah dalam pemaknaan pembaruan agrarian yang ada .

Penelitian yang dilakukan oleh Novina Sri Indiraharti dalam ‘Sertifikasi dan Permasalahannya’ juga menunjukkan bahwa sertifikat tanah merupakan salah satu hak milik yang sah, sebelum adanya pihak yang menggugat. Berarti sertifikat tanah tidak memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Hal yang sama dalam penelitian yang telah saya lakukan adalah bahwa sertifikasi merupakan awal dari munculnya sengketa tanah, karena sistem administrasi yang tidak baik. Hal yang berbeda terlihat dari bagaimana keberadaan pemerintah kerap menjadi determinan dalam sengketa tanah dan menampilkan peran pemerintah yang positif dalam sertifikasi.

Tabel 1.
Anatomi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Land registration within the framework of land administration reform in Lagos state E.O. Thontteh & M.M. Omirin	Pendaftaran tanah dalam menciptakan keteraturan di dalam negara, karena dengan terpetakan wilayahnya berarti berarti telah memetakan permasalahan tanah kedepannya	Penelitian yang dilakukan Membahas bagaimana pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat	Hal yang membedakan adalah pemerintah diartikan hanya sebagai negara, namun pada dasarnya pemerintahan desa merupakan sama-sama orang desa yang mempunyai pemahaman yang berbeda, karena berada di titik liminal.

2	<p>Rural Land Certification In Ethiopia: Process, Initial Impact, And Implications For Other African Countries</p> <p>Klaus Deininger, Daniel Ayalew Ali, Stein Holden, Jaap Zevenbergen</p>	<p>Keberadaan sertifikat menjadi awal peningkatan perekonomian untuk rumah tangga dengan pendapatan rendah. Keberadaan sertifikat menegaskan batas teritori dari suatu suku</p>	<p>Sesuai dengan harapan pemerintah indonesia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendaftaran sertifikat tanah. Hal yang diharapkan adalah munculnya usaha-usaha dari “pemutaran” uang dari sertifikat.</p>	<p>Kepastian hukum menjadi landasan utama, sehingga bagaimana pemerintah desa dalam memenejemen permasalahan yang ada ketika sengketa tanah.</p>
3	<p>Legal Certainty For Whom ? Land Contertatio and Value Transformations at Gili Trawangan, Lombok</p> <p>Carrol Warren</p>	<p>Temuan lapangan yang diperoleh oleh Luccas dan Warren menunjukkan bahwa pentingnya kepastian hukum merupakan hal yang penting, karena pada kasus yang terjadi di Gili Trawangan, keberadaan sertifikat menjadi benteng terakhir dalam mengamankan ranah privat yang dimiliki oleh masyarakat</p>	<p>Penelitian ini membahas potensi bagaimana pengaruh sertifikat tanah kepada kehidupan masyarakat perdesaan.</p>	<p>Pada konteks ini pemerintahan desa menjadi salah satu pihak yang berpotensi besar, saya tidak menyanggah melainkan pemerintahan desa itu sendiri juga sebagai agen antara pemerintah dan masyarakat. Peneliti yang hendak saya lakukan akan lebih banyak menekankan pada aktor pemerintah dalam</p>

		<p>dalam kaitannya sertifikat sebagai bentuk politik, yang dalam kasus di Gili Trawangan, dengan munculnya sertifikat tanah, maka semakin mudahnya tanah itu lepas, karena kepastian hukum yang ada telah mengikat. Kondisi ini membuat masyarakat yang sebelumnya mempunyai tanah yang luas, perlahan namun pasti akan melapasnya.</p>		<p>pemaknaan pembaruan agraria yang ada.</p>
4	<p>Sertifikasi dan Permasalahannya</p> <p>Novina Sri Indiraharti</p>	<p>Sertifikat tanah merupakan salah satu hak milik yang sah, sebelum adanya pihak yang menggugat. Berarti Sertifikat tanah tidak memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya.</p>	<p>Sertifikasi merupakan awal dari muncul sengketa tanah, karena sistem administrasi yang tidak baik.</p>	<p>Keberadaan pemerintah kerap menjadi determinan dalam sengketa tanah dan menampilkan peran pemerintah yang positif dalam sertifikasi.</p>

Berdasarkan beberapa kajian penelitian di atas, maka penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana tindakan sosial aktor pemerintahan Desa Sumberoto dalam program sertifikasi tanah. Tindakan yang dilakukan oleh aktor

pemerintahan desa dilatarbelakangi oleh permasalahan dan sengketa. Memperoleh kepastian hukum merupakan hak dari warga negara termasuk dalam penguasaan tanah oleh masyarakat. Hak ini telah diatur secara rigid oleh pemerintah, meskipun dalam prakteknya kental sekali dengan masalah politik. Sertifikasi ini juga dimaksudkan pemerintah untuk mengentas kemiskinan, namun yang terjadi adalah keberadaan sertifikasi ini rentan sekali dengan penyalahgunaan, yaitu sertifikat digadaikan bisa saja digunakan bukan untuk mendukung usaha, melainkan untuk konsumtif. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat tidak terlepas dari kemiskinan namun jatuh pada budaya konsumtif.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian : Definisi Sosial

Paradigma merupakan cara pandang atau (*frame of thought*) yang digunakan oleh peneliti terutama ilmuwan sosial dalam memandang, mengkaji, menginterpretasi termasuk menyulam atribut-atribut sosial menjadi sebuah narasi ilmiah (Mahmud dalam Hakim, 2018:51). Kerangka berpikir menjadi hal yang sangat diperlukan dalam memahami fenomena yang dibatin oleh subyek penelitian.

Lebih jauh, Denzin dan Lincoln, (2005), mendefinisikan paradigma sebagai “*basic belief system or world view that guides the investigator, not only in choices of method but i ontologically and efistimologically fundamental ways*”. Definisi ini dapat dipahami sebagai sistem keyakinan dasar beserta cara dalam memandang dunia yang membantu peneliti dalam mengamati fenomena sosial baik secara metode dan pemahaman fundamental, untuk mencari makna ontologis dan epistimologis.

Cakupan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mikro subyektif. Hal ini dikarenakan terbatas pada aktor-aktor di dalam pemerintahan daerah. Dalam kajian Weber lebih menekankan pada definisi dan cara berpikir aktor sosial dalam mendefinisikan situasi sosial mereka dan efek dari definisi itu pada tindakan atau interaksi setelahnya (Ritzer, 2014:1153). Aktor pemerintahan desa dalam memutuskan dalam pengambilan program PTSL merupakan tindakan yang sadar dan sarat akan makna. Persetujuan terhadap kepala desa merupakan bentuk akhir dari proses pemaknaan panjang aktor pemerintahan desa dalam pembaharuan agraria. Mereka tidak serta merta menerima, melainkan ada upaya untuk mengintrepetasi program ini. Paradigma definisi sosial ini mencoba untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, dimana tindakan ini mempunyai kausalitas akan fakta sosial yang terjadi.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi dalam penelitiannya. Pendekatan fenomenologi menurut Creswell (2009) *"phenomenological research is a strategy of inquiry in which their researcher identifies the essence of human experiences about phenomenon as described by participants"*.

Penelitian ini berlandaskan pada fenomena sosial yang ada di lapangan, dan dalam penelitian ini fenomena adalah keberadaan Program sertifikasi tanah sebagai faktor munculnya tindakan sosial dari aktor pemerintahan desa. Penelitian diawali dengan dilakukannya *mapping* atau pemetaan tempat penelitian. Pemetaan tempat penelitian ini menjadi acuan batas tempat dan batas masyarakat yang diteliti. Pemetaan sosial dan wilayah penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan arah penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ini adalah dengan cara pengamatan langsung, wawancara mendalam dan ikut serta dalam kehidupan sosial sehari-hari. Data yang diperoleh berupa data kualitatif. Secara konseptual, pemahaman tentang penelitian Kualitatif menurut Amaratunga dkk (2002), *"conducted through an intense and/or prolonged contact with a "field" or life situation"*. Huberman dan Miles (dalam Amaratunga, 2002) menjelaskan bahwa *"the situations are typically "banal" or normal, reflective of the everyday life of individuals, groups, societies, and organisations"*.

Pemahaman penelitian kualitatif di atas sudah lebih menekankan pada interpretif. Neumann (2016:188-189) menekankan pada kasus dan konteks serta makna budaya. Kondisi ini tidak terlepas dari relativitas dari suatu kebudayaan, yang dimana satu budaya mempunyai keunikan masing-masing. Mencari pemaknaan merupakan suatu hal yang mendasar dari tindakan individu, maka dari itu, dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai *"puzzle and an idea"* (Neumann, 2014:168). Penelitian kualitatif mencoba memecahkan teka-teki dalam kehidupan masyarakat yang sarat akan simbol-simbol dan makna yang tak jarang bias. Kondisi ini disebabkan karena logika terbentuk ketika proses pengumpulan data. Karena peneliti secara langsung praktek dalam masyarakat sehingga logika ini terrekonstruksi selama perjalanan penelitian (Neumann, 2016:189).

Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Desa Sumberoto merupakan salah satu desa yang memperoleh program nasional PTSL. Desa Sumberoto berada di sekitar 20 Km sebelah Selatan dari Kota Kepanjen. Desa ini dapat dikatakan merupakan desa yang belum

berkembang dimana pembangunan belum merata dan masyarakatnya lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Lokasi ini dipilih karena desa Sumberoto merupakan salah satu desa yang berani mengambil alih program yang sedang digiatkan pemerintah, yaitu pengurusan sertifikat tanah. Program Nasional ini dirasa menjadi salah faktor yang memicu munculnya fenomena baru di dalam masyarakat Sumberoto. Hal yang menjadi salah satu sebab mengapa tempat ini diambil adalah bagaimana pemerintahan desa begitu berani dalam mengambil kebijakan pengurusan sertifikat. Padahal secara permasalahan tanah di desa tersebut tidaklah mencolok dibandingkan dengan desa yang sebelah. Hal ini tentunya perlu didalami karena tindakan-tindakan yang diambil oleh aktor negara yang dimana adalah pemerintahan desa, mempunyai arti serta makna tersendiri oleh aktornya.

Subyek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada 12 subyek penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (Neuman, 2016:297). Orang yang menjadi subyek diambil secara sengaja oleh peneliti, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah ini diambil dengan tujuan, sesuai dengan informasi yang hendak diperoleh, karena yang menjadi fokus adalah aktor pemerintahan desa, maka pihak yang diwawancara adalah jajaran pemerintah desa, yang pada penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Sumberoto. Subyek penelitian yang diharapkan adalah :

1. Berasal dari warga desa Sumberoto, baik yang bersifat baru menetap maupun yang sudah lama menetap. Selain itu juga diperlukan beberapa informan yang bekerja di pemerintahan desa.
2. Informan berumur antara 20-75 tahun.
3. Informan merupakan aktor pemerintahan desa mulai dari kepala desa hingga kepala dusun.

Beberapa karakteristik yang ada di atas sangat jelas. Maka dari itu, sebelum bertemu dengan subyek penelitian, peneliti telah bertemu dengan *gatekeeper*, yaitu orang yang mampu mengenalkan peneliti kepada masyarakat di tempat penelitian (Creswell, 2018:131). *Gatekeeper* ini diperlukan karena keberadaannya mampu mengarahkan peneliti kepada orang-orang yang sesuai dengan penelitian.

Jumlah subyek penelitian yang diwawancara terbatas yaitu sebanyak 12 orang. Dalam pengumpulan data dari informan lebih ditekankan melalui wawancara terstruktur. Meskipun demikian sebagai pembanding digunakan pengamatan kepada kegiatan subyek penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini digunakan demi mensinkronkan antara yang diucapkan subyek penelitian dengan tindakannya.



[illegible]

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para subyek penelitian yang dirasa oleh peneliti melakukan tindakan sosial dalam pembaruan agraria di desa Sumberoto, yang secara *purposive* diarahkan kepada aktor pemerintahan desa, yaitu :Pemerintah Desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan dan ketua dusun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi (*observational surveys*), dimana peneliti terjun langsung mengamati lokasi penelitian. Pengamatan yang

dilakukan oleh peneliti tidak terbatas pada pengamatan secara visual, namun menggunakan seluruh indera perasa. Seperti mendengarkan cerita dari masyarakat dan mengamati tingkah laku masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi partisipasi yaitu bentuk pengamatan yang tak berstruktur atau informal dan ikut terjun dalam kegiatan masyarakat (Creswell, 2009).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi (*documentation*), dengan cara mengambil gambar dari hasil observasi maupun wawancara. Peneliti melakukan rekaman wawancara itu sendiri dipergunakan sebagai salah satu bukti dalam penelitian, kemudian hasil wawancara tersebut ditranskrip. Sebelum pengambilan gambar dan melakukan merekam wawancara peneliti melakukan izin kepada pihak yang bersangkutan.

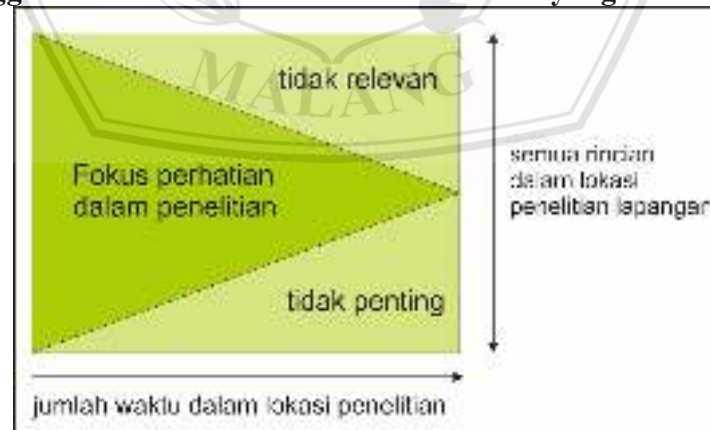
Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data kualitatif. Data-data kualitatif sendiri bersifat dinamis, fleksibel, dan bergantung pada suatu sistem nilai. Selain itu, data yang diperoleh pada akhirnya sangat beragam, sehingga data-data yang diperoleh bukanlah data yang linear melainkan data-data yang berupa cerita-cerita (narasi) yang mampu menciptakan beragam interpretasi.

Data-data yang diperoleh tidak dimasukkan ke dalam laporan secara utuh, melainkan mengalami pereduksian data. Langkah pereduksian data ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat fokus. Sebelum melakukan pereduksian data, peneliti melakukan pengelompokan data. Pengelompokan ini berguna untuk menyaring informasi yang masuk, informasi mana yang sesuai dan informasi mana yang tidak.

Gambar 3.

Penggambaran Pemfokusan Data Penelitian yang Ditampilkan

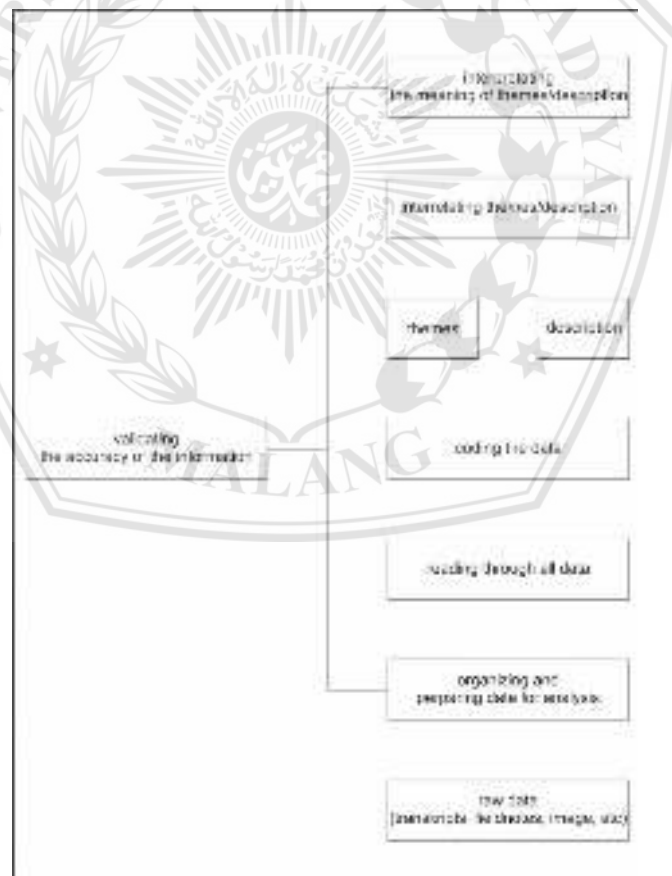


Sumber : Creswell, 2016

Data-data yang diperoleh dianalisis sebanyak dua kali, yaitu analisis permukaan dan analisis mendalam (Neuman, 2016:578). Analisis permukaan ini mengformulasikan asumsi dasar penelitian dengan data-data dari buku-buku serta observasi awal dan catatan lapangan peneliti. Kegunaan dari analisis awal ini untuk melihat latar kebudayaan yang bersangkutan dan sebagai gambaran umum wilayah. Sedangkan untuk analisa mendalam mengformulasikan hasil formulasi analisis permukaan dengan temuan di lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan.

Wawancara mendalam ini dilakukan ke beberapa informan yang dirasa memahami fenomena sosial yang terjadi. Karena pendekatan yang digunakan fenomenologi maka dalam melakukan analisa data ditekankan dengan menggunakan analisa fenomenologi yaitu pada penelitian ini menggunakan analisa refleksi fenomenologis. Menurut Van Manen (dalam Creswell, 2018:271) bahwa dalam penelitian fenomenologi bertujuan untuk melakukan refleksi dalam memaknai esensial dari sesuatu (fenomena).

Gambar 4.
Alur Analisis Data



Sumber: Creswell (2009)

Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data bukanlah sebuah jawaban pasti dari yang diucapkan oleh informan. Informasi dari informan merupakan data mentah yang kemudian disesuaikan dengan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengvalidasi data penelitian menggunakan 3 tahap. Tahap Pertama adalah validitas data melalui Triangulasi data yaitu peneliti melakukan pengecekan pernyataan informan kepada pihak-pihak terdekat dengan informan dan melakukan pengamatan langsung (Neuman, 2016:186). Langkah kedua, teknik validasi yang digunakan dengan menggunakan *prolonged observation*, yaitu peneliti hidup dalam jangka waktu tertentu di wilayah penelitian untuk dapat melakukan pengamatan serta observasi partisipasi terhadap masyarakat yang sedang diteliti. Pada langkah ketiga peneliti melakukan validasi dengan menggunakan *thick description* atau deskripsi secara mendetail. Deskripsi ini diambil dalam fieldnote atau catatan lapangan peneliti.

Menurut Moustakas (Dalam Cresswell, 2018:269), terdapat enam tahapan utama dalam menganalisa informasi dari informan, yaitu pertama mendeskripsikan pengalaman personal dengan fenomena yang sedang dipelajari. Tahap kedua yaitu peneliti menyimpulkan pernyataan dari hasil wawancara awal dan referensi. Tahap ketiga, melakukan pengelompokan unit informasi yang besar dan disesuaikan dengan unit makna atau tema. Tahap keempat membuat model deskripsi yang dapat mendukung pengelompokan makna dan informasi di atas, yaitu dengan membuat catatan lapangan. Keenam, deskripsi yang ditulis disesuaikan dengan pertanyaan yang mampu memunculkan pemaknaan, serta terkait dengan konteks dan latar belakang fenomena yang terjadi. Tahap keenam, menulis deskripsi reflektif atau deskripsi gabungan secara struktural dan tekstual. Hal yang menjadi pokok utama dalam tahapan ini adalah terjawabnya pertanyaan “apa” dan “bagaimana”.

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Kondisi Alam dan Administrasi Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang

Secara Administratif Desa Sumberoto merupakan satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Berdasarkan data dari Kecamatan Donomulyo, Desa Sumberoto terbagi dalam lima wilayah perdusunan yaitu Dusun Sumberoto, Dusun Ngrendeng, Dusun Kalisangkrah, Dusun Panggung Waru dan Dusun Sumberejo. Bentang alam di Desa Sumberoto dapat dikatakan beraneka ragam dan memanjang dari Utara ke Selatan. Ragam bentang alam di desa ini mulai dari deretan gunung kapur di sebelah Utara, dataran rendah di wilayah tengah dan pantai di daerah Selatan.

Batas-batas wilayah Desa Sumberoto yaitu Sebelah Utara Kecamatan Kalipare, sebelah Selatan Samudra Indonesia, Sebelah Barat Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, dan Sebelah Timur Kecamatan Sumbermanjing. Tipologi Desa Sumberoto merupakan desa pesisir, namun sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani. Desa Sumberoto secara umum berada di daerah pegunungan yang mempunyai rata-rata ketinggian mencapai 480 MDPL.

Dusun Sumberoto yang berada di wilayah paling Utara Desa Sumberoto mempunyai kontur wilayah yang didominasi dengan wilayah pegunungan kapur. Sebagian besar wilayah Dusun Sumberoto difungsikan sebagai kebun tebu dan pertanian monokultur, seperti jagung, kacang dan padi gogoh/padi ladang. Dusun Ngrendeng Wilayah tengah yang didominasi oleh pemukiman merupakan daratan rendah yang berada di dusun Ngrendeng dan Kalisangkrah digunakan difungsikan sebagai sawah (tadah hujan) dan perkebunan tebu sedangkan wilayah Selatan yang di dominasi oleh hutan milik Perhutani dan warga terdapat di Dusun Panggung Waru dan Dusun Sumberejo. Wilayah pesisir yang terdapat di jalur pantai selatan berada di Dusun Sumberejo.

Desa Sumberoto terdiri dari 44 RT dan 10 RW. Sepertinya hal desa-desa lain, desa Sumberoto dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh empat orang perangkat desa, yaitu sekretaris desa (*carik*), Kaur (Kepala Urusan) Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Keuangan. Pemerintah juga mempunyai perwakilan setiap dusun yang biasa disebut dengan Kepala Dusun. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) masing-masing dipimpin oleh seorang ketua.

Desa ini diapit oleh pegunungan-pegunungan kapur, serta terdapat beberapa area persawahan dan ladang penduduk. Area persawahan ini terletak di dataran rendah dan berada dekat dengan pemukiman warga. Sedangkan untuk lahan berkontur miring lebih banyak digunakan warga sebagai ladang tempat menanam tanaman kayu-kayuan yang bernilai komersil, seperti kayu jati, sengon, akasia dan lain-lain. Selain itu tanah di sela-sela tanaman kayu tersebut biasanya digunakan masyarakat untuk menanam rumput sebagai pakan ternak.

Berdasarkan data di atas, Desa Sumberoto mempunyai luas wilayah sekitar 2.130 Ha. Tanah di desa Sumberoto didominasi oleh tanah kering seluas 1.342,70 Ha, tanah sawah 142 Ha, tanah desa 83,35 dan Hutan 562,55 Ha. Keberadaan tanah datar yang banyak berada di dusun Ngrendeng dan Kalisangkrah dimanfaatkan untuk pertanian.

Penduduk dan Kehidupan Sosial-Budaya

Jumlah penduduk di desa Sumberoto sebanyak 8.418 jiwa atau 2507 KK, dengan jumlah laki-laki 4.183 jiwa dan perempuan 4.235 jiwa. Sebagian besar penduduk desa Sumberoto masuk dalam kategori desa yang menua, karena

berdasarkan data desa, jumlah penduduk yang memasuki Usia angkatan Kerja (15-64 tahun) di desa Sumberoto hanya sebanyak 1.112 yaitu Laki-laki 462 dan Perempuan 650. Hal ini diperparah dengan mereka yang berusia produktif lebih memilih pergi merantau keluar daerah, terutama ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya demi meningkatkan status sosial mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sumberoto masih memiliki permasalahan akan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan, hingga keamanan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dari pada mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa dusun di Desa Sumberoto akan merasakan kesulitan air disaat kemarau panjang yang mengharuskan warga mencari air dari kubangan, hutan atau membeli dengan harga yang cukup mahal. Berdasarkan data dari pemerintahan desa (<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>) terdapat 350 sumur gali dan 45 sumber air alami yang dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan airnya dan sebagian besar sumber air tersebut mengering di musim kemarau.

Mengenai permasalahan sanitasi, masyarakat Sumberoto dalam pengelolaan sampah masih dibuang dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibakar. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tidak adanya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) akhir untuk sampah rumah tangga. Dusun-dusun yang berada di selatan juga tidak memiliki kamar mandi yang memadai padahal dari segi ekonomi mereka sebenarnya mampu untuk menambahkan alat kakus yang mumpuni. Mereka lebih memilih untuk merenovasi rumahnya daripada membangun kamar mandi yang lengkap dengan bak dan kloset. Sampai saat ini, masih terdapat sebagian warga dusun yang berada di Desa bagian selatan masih memiliki tempat mandi dan kloset terbuka.

Dari segi pendidikan, setiap warga di desa Sumberoto dapat dikatakan pernah mengenyam Pendidikan, baik dari tingkat SD maupun SMA. Kondisi ini didukung dengan keberadaan fasilitas Pendidikan yang cukup memadai. Di desa Sumberoto terdapat enam fasilitas pendidikan, yaitu enam Play Group Swasta, lima Taman Kanak-Kanak Swasta, lima Sekolah Dasar Negeri, satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, satu Madrasah Aliyah Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama Swasta. Di desa ini tidak terdapat sekolah menengah, jadi jika ada anak yang berkeinginan melanjutkan sekolah mereka harus ke kecamatan. Anak-anak yang berkesempatan sekolah lanjutan lebih berminat mengambil sekolah kejuruan, seperti pelayaran, kecantikan, otomotif dan sebagainya. Minat untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah akhir kurang dimininati karena jarang dari mereka yang berencana untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Di desa Sumberoto, keberadaan masjid dan mushola yang tersebar banyak menandakan bahwa mayoritas warga memeluk agama Islam. Terdapat juga warga yang memeluk agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, mereka memiliki

tempat ibadah dua buah gereja Kristen Katolik dan satu buah gereja Protestan. Dengan kondisi warga yang terdiri dari beragam agama, hampir tidak pernah terjadi perselisihan antar umat beragama. Keadaan di lapangan memberikan bukti yang nyata bahwa dalam satu keluarga sangat lumrah ditemukan anggota keluarga yang berbeda agama antara satu dengan yang lain baik karena faktor perkawinan atau pilihan pribadi.

Jika melihat pola perkawinan penduduk Sumberoto, perkawinan yang dilakukan warga berupa perkawinan endogami, artinya perkawinan yang dilakukan dengan sesama penduduk desa Sumberoto, meskipun demikian juga terdapat beberapa penduduk yang menikah dengan orang di luar daerah Sumberoto. Sehingga biasanya antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya masih merupakan satu keluarga besar.

Dari segi kehidupan budaya, masyarakat Desa Sumberoto dalam kesehariannya menggunakan Bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Selain itu, mereka terbilang masih aktif dalam melakukan kegiatan seni dan melakukan ritual adat-istiadat. Sebagai bukti nyata, kita dapat menemukan kelompok jaranan, karawitan, campursari, pelukis, dalang, sinden, wayang di Desa Sumberoto. Beberapa adat-istiadat juga masih rutin dilakukan seperti kegiatan bersih desa, "*sabetan*", penyambutan kelahiran, dan masih banyak lagi bentuk ritual yang dilakukan.

Ekonomi Lokal Masyarakat desa Sumberoto

Bentang alam di desa Sumberoto terdiri dari pegunungan, tanah datar dan pesisir. Tanah pegunungan lebih banyak ditanami tanaman yang bersifat komersil dan akan dikunjungi secara berkala untuk memanen tanaman kayu-kayuan, seperti sengon, akasia, dan jati. Tanah datar dimanfaatkan sebagai area persawahan. Sedangkan untuk daerah pesisir tidak dimanfaatkan oleh warga karena ombaknya yang besar, sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat bersandar perahu. Hal inilah yang menyebabkan meskipun disebut sebagai desa pesisir, namun warga desa Sumberoto tidak ada yang bermata pencaharian sebagai Nelayan. Pekerjaan dalam sektor jasa mulai tumbuh seiring dengan perkembangan desa Sumberoto. Pekerjaan sebagai pejabat pemerintahan, pedagang dan pekerjaan di bidang jasa lainnya sudah mulai tumbuh di daerah ini.

Warga Desa Sumberoto sebagian besar bekerja disektor pertanian. Paling banyak penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun secara nyata hasil pertanian mereka tidaklah maksimal karena dari tahun ke tahun desa ini dilanda kekeringan, sehingga hasil panen menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan oleh warga desa. Hasil bumi yang menjadi unggulan Desa Sumberoto adalah padi, palawija, kakao, kelapa, tembakau, jati, sengon, dan beberapa tanaman buah. Namun komoditas andalan Desa Sumberoto adalah Jagung. Hampir sebagian besar

tanah di desa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam jagung. Masyarakat di desa Sumberoto juga memiliki kegiatan sampingan sebagai peternak. Hewan ternak yang biasa dipelihara warga adalah kambing, sapi dan unggas, seperti bebek dan ayam. Sistem pemeliharaan hewan ternak di desa ini beragam, ada yang milik pribadi dan ada yang *maro* atau merawat milik tetangga.

Di Wilayah Utara, yang didominasi oleh pegunungan kapur dimanfaatkan oleh warga untuk mencari batu kapur dalam skala kecil. Pemanfaatan area bukit kapur ini masuk dalam pertambangan ilegal, karena kerap kali tambang batu kapur ini ditutup oleh Polisi, karena mendapat laporan bahwa galian tersebut membahayakan masyarakat yang bermukim di bawah pegunungan tersebut.

Pelapisan Sosial Masyarakat Desa Sumberoto

Mata pencaharian utama di Desa Sumberoto berada pada sektor pertanian yang dilakukan dengan cara "*pertanian alami*" yang minim dengan tindakan intensifikasi. Lambat laun sistem pertanian ini mengalami pembaharuan dengan masuknya pupuk serta alat-alat pertanian lainnya. Sektor pertanian ini mengalami perubahan dalam orientasinya. Pada mulanya bersifat subsisten dan belakangan menjadi komersil. Berbagai polarisasi jenis pekerjaan yang berakar pada sistem pertanian masih dalam tahap berkembang. Hal ini disebabkan semakin sempitnya lahan pertanian yang ada di Desa Sumberoto.

Tabel 2.
Jenis penggunaan tanah di Desa Sumberoto tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas Tanah (ha.)
1	Tanah Sawah	142,00
2	Tanah Kering	1342,70
3	Tanah Basah	0,00
4	Tanah Perkebunan	0,00
5	Fasilitas Umum	83,35
6	Tanah Hutan	562,55
Total Luas		2.130,00

Sumber : <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/> diakses 26 Juni 2019

Tanah yang merupakan basis utama produksi masyarakat pertanian menjadikan pelapisan masyarakat bergantung pada kepemilikan tanah tersebut. Permasalahan tanah di desa Sumberoto mulai berlarut-larut dikarenakan adanya perpindahan kepemilikan tanah yang cepat. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal yang kemudian menyebabkan kepemilikan tanah di Desa

Sumberoto semakin menyempit. Dalam konteks sejarah nasional, Desa Sumberoto juga turut ambil bagian dalam membentuk sejarah negara ini. Terjadinya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 juga menghebohkan Desa Sumberoto. Peristiwa tersebut turut mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat di Desa Sumberoto. Sebagian besar permasalahan dan kesulitan yang dirasakan masyarakat Desa Sumberoto selalu terkait dengan faktor ekonomi, terlebih pada sektor pertanian. Sektor ini telah menyumbang andil yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Desa Sumberoto. Permasalahan dan kesulitan ini berkaitan erat dengan model pengelolaan yang produktif secara ekonomi di lahan yang terbatas. Sementara ini, sektor pertanian dikatakan masih mampu menggerakkan roda kehidupan masyarakat Desa Sumberoto. Namun kekhawatiran datang ketika sektor pertanian ini hanya dapat dipertahankan namun tidak dapat dikembangkan.

Kepemilikan tanah untuk masyarakat tetap menjadi salah satu indikator utama, namun dengan mulai enggan masyarakat untuk turun dalam sektor pertanian, menjadikan pekerjaan menjadi salah satu indikator dalam pelapisan sosial. Bukan hal yang baru dalam masyarakat perdesaan, namun dengan semakin ditinggalkannya sektor pertanian, maka pelapisan ini terlihat pincang, karena yang menjadikan patokan utama pelapisan sosial ini mulai bergeser. Keberadaan pola pikir baru ini menjadikan masyarakat Desa Sumberoto meletakkan tanah bukan lagi suatu basis ekonomi mendasar. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin sempitnya tanah yang dimiliki hingga ketiadaan modal dalam mengolah tanah pertanian menyebabkan sebagian besar generasi muda enggan mengolah lahan pertaniannya.

Sertifikasi Tanah di Desa Sumberoto

Program PTSL yang diterima oleh Desa Sumberoto, bukan merupakan program yang secara mudah diberikan oleh Pemerintah, melainkan Pemerintahan Desa harus aktif dalam mengajukan ke pihak ATR BPN, karena pada dasarnya tidak semua Desa di Malang Raya memperoleh jatah sertifikasi tanah ini. Untuk daerah-daerah yang berada di Pihak-pihak pemerintah desa mengklaim bahwa program ini bisa sampai ke desa Sumberoto merupakan jerih payah dari Pak Budi dan Pak Tariyadi. Kedua orang ini merupakan inisiator dari masuknya program PTSL. Kedekatan personal antara Pak Budi dengan Bupati Malang, membuat Desa Sumberoto menjadi anak kesayangan Bupati Malang. Kedekatan ini diwujudkan dengan banyaknya kegiatan yang berskala nasional diadakan di Desa Sumberoto yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan.

Keberadaan program PTSL tidak dapat dipisahkan dari adanya upaya untuk mempertahankan pengaruh politik dari aktor pemerintahan yang menjabat yang dalam tataran ini adalah Kepala Desa. Sebagian besar pejabat desa yang ada masih mempunyai ikatan keluarga dengan Kepala Desa. Jika dirunut dari garis keturunan

keluarga, maka dari 12 aktor pemerintah desa, hanya dua orang yaitu Pak Tukiyat dan Pak Tariyadi yang bukan keluarga, dan di dalam waktu yang bersamaan keduanya merupakan oposisi dari kepala desa (untuk lebih jauh dapat membaca laporan pemetaan sosial YWSN tahun 2014).

Tabel 3.
Sertifikasi di Desa Sumberoto

No	Tahun	Program	Status				Jatah Ukur	Catatan
			Sertifikat	K1	K2	Luar Kategori		
1	2017	Prona	325				325	Meminta Kuota tambahan 100 bidang
2	2018	PTSL	3100	700		500	5800	Jatah 2600 bidang. 1200 hibah dari desa lain.
3	2019	PTSL	700				1500	Jatah ukur ini masih diajukan (bergantung presiden)

Sumber : Wawancara dengan Kepala desa dan Ketua PTSL Desa Sumberoto

Pada hal ini, asumsi peneliti bahwa adanya upaya dari pemerintah desa untuk mempertahankan pengaruh politiknya terbukti dalam konten sambutan yang disampaikan kepala desa pada sesi penyerahan sertifikat. Pada sesi tersebut disebutkan secara gamblang bahwa program sertifikasi sudah ada sejak pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun kepala desa dikatakan tidak mengambil program karena menyadari adanya potensi masalah tanah di desa ini. Kemudian dengan tersirat Pak Budi selaku kepala desa berbicara program ini tidak bisa turun ke Desa Sumberoto jika tidak ada campur tangan dari Pak Budi. Pak Budi juga menyebutkan bahwa pengaruh beliau yang kuat baik dalam hubungan dengan pemerintah pusat dan kemampuan dalam menekan pejabat desa, membuat program ini dapat masuk dan aktor pemerintah desa menyetujui program ini untuk masuk ke desa dan sukses.

Terdapat dua aktor utama dalam masuknya program PTSL ke Desa Sumberoto, yaitu Pak Budi dan Pak Tariyadi. Program PTSL menjadi alternatif pemerintah desa Sumberoto dalam mengangkat ekonomi masyarakat desa. Desa yang mencanangkan diri sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Malang, ini beranggapan bahwa dengan adanya sertifikat dapat menjadi modal utama masyarakat untuk terjun dalam ekonomi berbasis wisata atau memperkuat pertaniannya. Pertanian di Sumberoto yang homogen, menurut kepala desa dengan “*nyekolahke sertifikat*” (menggadaikan sertifikat) menjadi modal untuk petani tersebut untuk lebih inovatif dalam mengurus pertaniannya. Anggapan pemerintah desa ini mendapat kritikan dari beberapa masyarakat yaitu dengan jawaban atas ceramah kepala desa “*pinter nyilihe, susah mbalekne*” (pintar meminjam susah mengembalikan). Tanggapan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa ketakutan dari masyarakat untuk meminjam uang di bank, mereka takut tidak bisa mengembalikan.

Aktor pemerintahan desa sangat berperan besar dalam Program PTSL di Desa Sumberoto. Mulai dari Kepala desa hingga ke tingkat Ketua RT di masing-masing dusun bergerak secara serentak. Kondisi ini di dukung dengan adanya upah harian yang lebih besar dibandingkan hari biasa. Dalam sehari biasanya orang desa (dalam konteks ini ketua RT tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga bekerja serabutan) mendapat upah Rp 60.000,- hingga Rp 75.000,-, namun untuk pengukuran ini mereka mendapatkan upah Rp 100.000,- ditambah dengan rokok dan makan siang. Kondisi ini membuat program ini lebih banyak dikerjakan oleh aktor pemerintahan desa. Selain karena upah, keberadaan pejabat desa dalam proses pengukuran ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanah (jikalau terjadi) ketika pengukuran menemukan masalah. Hasilnya dari pengukuran yang sudah berlangsung, sengketa yang terjadi tidak berlarut, karena Ketua RT memahami secara betul alur perpindahan tanah di wilayahnya. Meskipun demikian, aktor pemerintahan tidak mempunyai kewenangan yang kuat ketika dihadapkan dengan adanya sengketa tanah antara masyarakat dengan LSM. Seperti pada kasus di Yayasan Wilwatikta Shripala Nusantara, aktor pemerintahan desa tidak bisa mengambil keputusan, sehingga melibatkan aparat kepolisian dan hasilnya nihil, karena permasalahan ini harus dibawa ke tingkat pengadilan, dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah.

Permasalahan antara Yayasan dan masyarakat ini membuat program PTSL di desa Sumberoto menjadi terhambat. Kondisi ini membuat pihak desa berupaya untuk menengahi. Pemerintahan Desa mengadakan audiensi antara pihak Yayasan dengan masyarakat yang bersengketa. Pertemuan ini tidak menemukan titik temu, karena secara legalitas, pihak masyarakat yang hanya dibekali dengan bukti membayar pajak, yang secara hukum bukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Sehingga secara hukum pihak Yayasan tidak berkenan menanggapi permasalahan ini sementara pihak desa juga enggan membuka “*bedah krawang*” atau sejarah alur

jual beli tanah di desa dan berkas Letter C. Kondisi ini secara tidak langsung menempatkan pihak aktor pemerintahan desa sebagai pihak yang bermasalah. Berdasarkan penuturan dari petinggi Yayasan, proses pengurusan sertifikat tanah Yayasan, pihak desa juga mengetahui, bahkan kepala desa juga menandatangani sertifikat Yayasan tersebut.

Menurut Pak Alex dan Pak Budi, keberadaan program PTSL ini secara ekonomi memberikan peluang ekonomi baru untuk masyarakat namun secara historis akan memunculkan permasalahan tanah. Kondisi ini disadari betul oleh kepala desa, dan kepala desa melihat ini sebagai hal yang harus dihadapi. *“Gawe sangu tuwo, enek tinggalan apik nang ndeso, mas”* (untuk bekal di usia tua, ada tinggalan baik di desa, Mas).

Pak Budi menyadari permasalahan tanah ini harus segera diselesaikan agar petani di desa tidak merasa khawatir akan kepemilikan tanahnya dan dapat digunakan sebagai tambahan modal. Namun menurut beberapa warga, terutama mereka yang petani tua melihat bahwa *“gek sopo sing arep ngrebut tanahku”* (siapa yang hendak merebut tanahku), tidak ada pentingnya memiliki sertifikat tanah, dan sertifikat tanah ini hanya berguna untuk anak-anak mereka. Menurut Pak Suprihatin, selaku ketua pelaksana PTSL dan Anggota LPMD di Dusun Sumberoto, kondisi ini menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat desa yang tidak memahami pentingnya sertifikat masih banyak. Bahkan di atas disebutkan bahwa, banyak warga yang tidak ikut sertifikasi. Menurut Pak Suprihatin, perihal tidak banyaknya warga yang tidak ikut sertifikasi dikarenakan adanya pungutan yang jika dibandingkan dengan pengurusan sertifikat secara mandiri menghabiskan biaya yang lebih banyak.

Faktor budaya juga menjadi penyebab beberapa warga tidak mengikuti sertifikasi, yaitu karena tanah milik orang tua belum diwariskan, dan mempertanyakan warisan kepada orang tua yang masih sehat merupakan hal yang tidak sopan. Namun perihal alasan kedua ini, pemerintah desa menyarankan agar tanah tersebut diatas namakan dengan ahli waris sehingga sebidang tanah dimiliki oleh beberapa orang.

Tabel 4.
Kepemilikan Tanah Warga Desa Sumberoto

ASET TANAH WARGA DESA	JUMLAH
Tidak memiliki tanah	7 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	37 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	126 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	473 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	376 orang

Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	365 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	59 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	62 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	267 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	136 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	145 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	23 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang

Sumber: Profil Desa Sumberoto 2018

Faktor lain yang membuat warga enggan mengurus sertifikat adalah letak tanah yang terpencar. Sebagian besar warga memiliki luas tanah antara $\frac{1}{4}$ Ha hingga $\frac{3}{4}$ Ha. Jumlah luasan tanah ini merupakan gabungan dari beberapa petak, dan tersebar di beberapa tempat sehingga jika dalam pengurusan tanah yang dipatok dengan harga Rp 400.000,- per bidang, warga keberatan. Padahal jika mengandalkan hasil panen tahunan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan setahun. Faktor biaya tetap menjadi alasan utama.

Berkaitan dengan penyebab pemerintahan desa menjadi aktor penting dalam sertifikasi ini adalah adanya trauma dari masyarakat dengan aparaturnya. Mereka melihat bahwa setiap program dari pemerintah membawa serta aparat militer, di sini ketakutan masyarakat kepada aparaturnya diingatkan kembali, jika tidak menerima program berarti orang yang menentang pemerintah. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa Desa yang pernah terpuruk di tahun 1965-1968 ini hanya bisa pasrah jika ada program dari pemerintah, namun di sisi lain mereka menolak dengan cara halus. Sebagian besar masyarakat menceritakan secara turun temurun kengerian di tahun 1965-1968. Sehingga memori tentang otoriternya pemerintahan desa pada masa tersebut masih terpatrit di benak masyarakat.

Cerita lebih jauh, aktor pemerintahan desa berperan besar dalam adanya polarisasi kepemilikan tanah oleh masyarakat desa. Tanah yang semula luas secara perlahan “dipaksa” dijual ke pemerintahan desa. Kasus yang teringat secara jelas oleh masyarakat adalah proses penjualan tanah yang dimiliki Yayasan. Menurut mereka pada masa itu, tanah tersebut dibeli secara paksa dengan harga yang sangat murah, bahkan ada yang hanya diminta tanpa ada ganti rugi, dan selama proses pembelian ini melibatkan aparat militer. Maka dari itu, ingatan buruk tentang aparat militer dan Pemerintahan desa benar-benar diingat oleh masyarakat (YWSN, 2017).

Rasionalisasi Pemerintah Desa

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumberoto dapat dipahami sebagai upaya menciptakan ruang baru untuk masyarakat terutama dalam memperoleh modal usaha baru. Berkaitan dengan yang mendasari pemerintahan desa untuk menarik program PTSL (Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap) tidak terlepas adanya tindakan sosial dari aktor pemerintahan desa. Pemerintahan desa kerap kali tidak dianggap sebagai salah satu aktor dalam tindakan sosial, meskipun sebenarnya dalam pemerintahan desa bias dengan adanya dikotomi antara negara dan masyarakat. Menurut Migdall, dalam kajian penelitiannya bagaimana pada dasarnya pemerintahan merupakan bagian dari masyarakat, kerap kali dipisahkan secara “kasar”, yang dimana seolah-olah pemerintahan tidak berpijak pada tanah dan lebih hidup berpisah. Meskipun dapat dikatakan pada dasarnya pemerintahan secara struktural berada pada posisi yang berbeda dari masyarakat pada umumnya namun hal yang harus disadari pertama adalah pemerintahan merupakan bagian masyarakat yang tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman yang menjadi landasan berpikir dari tindakan-tindakan yang diambilnya dalam pemerintahan. Terlepas dari tindakan yang dilakukan adanya upaya yang dilakukan bermuatan politis maupun tidak, namun yang pasti setiap individu yang melakukan tindakan sosial mempunyai pemaknaan tersendiri sebelum bertindak.

Pemerintahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemerintahan Desa Sumberoto. Pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa strata ini menunjukkan bahwa adanya sebuah program yang turun pada tingkatan masyarakat desa berkaitan dengan pengalaman dari aktor pemerintahan desa. Pada kajian ini terfokus bagaimana pemerintahan desa mampu menghadirkan sebuah program sertifikasi massal dan tujuan-tujuan dari program ini dari kacamata pemerintahan desa. Sertifikasi merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan agraria yang tentunya aktor pemerintahan mempunyai pemaknaan tersendiri dalam program yang sengaja dihadirkan di desa tersebut. Sebelum lebih jauh, Kepala Desa Sumberoto, yaitu Pak Budi Utomo menceritakan bagaimana pengalamannya dalam proses pengurusan sertifikat tanahnya.

Tindakan sosial yang menjadi salah satu upaya Weber dalam menggambarkan fenomena sosial dapat dipahami dengan pendekatan *Verstehen* (Ritzer, 2016:199 dan 2016: 40). Pemahaman mendalam terhadap sebuah fenomena sosial dengan menggunakan penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*). Kepala desa mensertifikasikan tanah masyarakat desa melalui program PTSL merupakan sebuah tindakan yang penuh arti, dan tidak dapat dipahami hanya dengan melakukan pengamatan saja. Maka dari itu, dalam menemukan makna dari tindakan kepala desa ini dilakukan wawancara dan pendekatan kepada aktor-aktor pemerintahan desa yang lain.

Hal yang mendasari aktor pemerintahan desa sebagai subyek penelitian ini tidak terlepas dari adanya pemahaman dari Weber (2016:200), bahwa pada dasarnya kajian tindakan sosial tidak dapat dilepaskan dari adanya aktor, interaksi dan semua sejarah manusia. Sejarah manusia ini berkaitan dengan adanya faktor sebab akibat atau dapat dipahami sebagai kausalitas. Sertifikasi bisa dianggap sebagai sebab munculnya fenomena sosial, namun dalam pemahaman penelitian ini sertifikasi dapat menjadi sebuah akibat dari fenomena sosial. Fenomena sosial yang dimaksud adalah perilaku penumpukan kapital dan upaya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan uang tunai. Maka dari itu, secara tersirat semakin cepatnya pergerakan perbaikan administrasi pertanahan diikuti dengan munculnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ini berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi ini menggambarkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semula gencar untuk menabung dan bergeser menjadi tindakan konsumsi sebagai salah satu wujud kemapanan ekonomi. Indikator kemapanan ekonomi menurut Kepala Desa adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang di bank. Jumlah yang pasti keberadaan orang-orang yang meminta surat pengantar untuk meminjam uang di bank mencapai 3-4 orang (Paraprase Wawancara dengan Pak Tukiyat).

Weber (dalam Ritzer, 2016:39) mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian yang dalam konteks ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan paradigma Definisi Sosial, salah satunya dalam penerapan teori Tindakan Sosial.

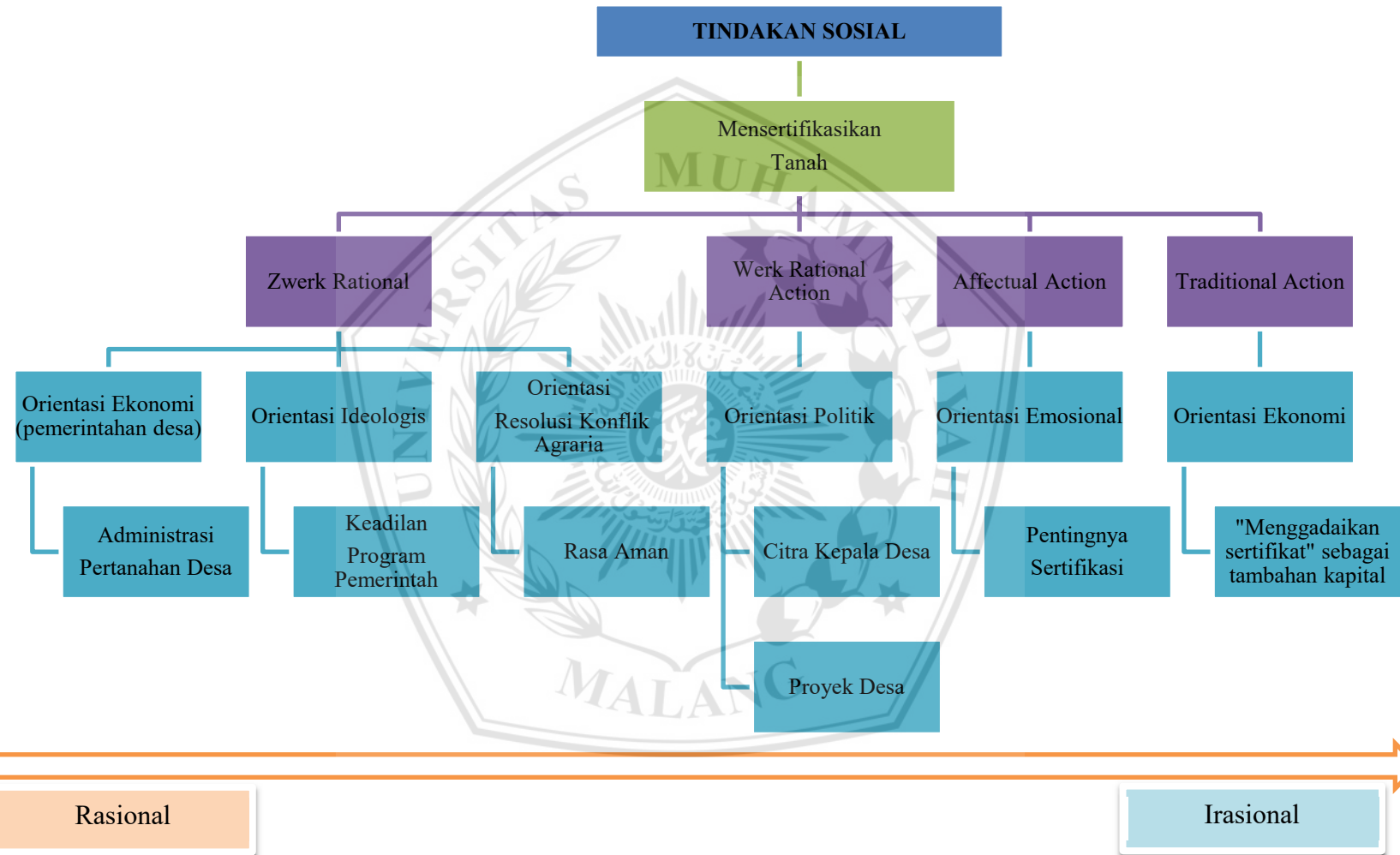
1. Tindakan dari si aktor mengandung makna yang subyektif. Makna subyektif ini dipahami oleh aktor didapatkan melalui pengalaman pribadi. Kepala desa yang merupakan salah satu aktor dari pemerintahan desa melakukan tindakan sosial berupa pengambilan program PTSL. Program PTSL merupakan instrumen yang digunakan oleh kepala desa dalam mengatasi masalah ekonomi di Desa Sumberoto. Pengentasan masalah ekonomi dengan cara memberi peluang kepada masyarakat agar memperoleh dana segar melalui pinjaman ke Lembaga peminjaman uang, seperti Bank atau Koperasi dengan menggunakan sertifikat tanah hasil PTSL sebagai jaminannya. Makna ini dapat disampaikan secara tersurat maupun secara tersirat
2. Tindakan si aktor yang bersifat subyektif. Tindakan yang dilakukan merupakan hasil dari pemaknaan yang mendalam yang bersifat membatin. Sertifikasi tanah secara masal yang didatangkan oleh kepala desa merupakan sebuah tindakan yang berasal dari pemahaman kepala desa tentang sertifikasi tanah merupakan salah satu alternatif jalan keluar dalam memperoleh dana segar. Maka dari itu, tindakan mendatangkan sertifikasi tanah terpengaruh pengalaman dari kepala

desa tersebut. Pengalaman subyektif aktor pemerintahan desa ini menjadi latar belakang tindakan sosial tersebut.

3. Tindakan ini diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Pada kasus ini kepala desa yang menduduki struktur sosial tertinggi di pemerintahan desa secara sadar penuh makna dan nyata menggunakan kewenangannya dalam melakukan sertifikasi secara massal, yang dimana tindakan ini diarahkan kepada seluruh warga desa.
4. Tindakan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif dari suatu situasi. Konsep pengaruh positif ini sangatlah cair, karena jika berkaca pada ciri sebelumnya, semua tindakan yang dilakukan bermakna subyektif. Maka dari itu, bagi kepala desa sertifikasi mempunyai pengaruh positif kepada masyarakat, yang pada kondisi lapangan berada pada posisi minim dana segar dan kepemilikan tanahnya yang tidak jelas dan berpotensi memunculkan sengketa tanah.
5. Tindakan yang dilakukan memperhatikan tindakan orang lain dan terarah. Pada tahap ini, sertifikasi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh kepala desa karena pada periode sebelumnya, kepala desa tidak pernah mengambil program ini, karena dirasa sarat akan masalah. Maka dari itu, sertifikasi ini merupakan tindakan nyata yang sebelumnya memperhatikan tindakan kepala desa sebelumnya. Tendensi politik terlihat secara jelas dalam tahap ini.

Tindakan sosial yang menjadi salah satu pemikiran dari Weber menjelaskan bahwa setiap hal yang dilakukan individu mempunyai muatan nilai dan makna serta hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, tak terkecuali pada hasil penelitian ini adalah aktor pemerintahan. Satu hal yang menjadi salah satu perhatian dari tindakan sosial adalah rasionalitas. Rasionalitas menjadi faktor utama tindakan sosial. Meskipun demikian, seperti yang dipahami di atas, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya orientasi-orientasi yang menjadi penggerak tindakan sosial. Pada kasus sertifikasi ini, orientasi ideologi, ekonomi dan politik menjadi orientasi penting dari adanya sertifikasi.

Gambar 5.
Tindakan Sosial Pemerintahan Desa



Sumber: Analisis Pribadi

Penjelasan dari Skema di atas adalah sebagai berikut:

1. Zwerk Rational

Sebuah tindakan sosial yang menentukan nilai dari tindakan yang dilakukan sebelum mencapai tujuan. Aktor secara sadar dan secara berhati-hati dalam mengambil tindakan, karena sistem nilai yang mengikat individu dari aktor tersebut dalam setiap tindakan yang diambil. Sertifikasi tanah secara massal merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintahan desa secara sadar. Nilai yang mengikat adalah pemerintah hendaknya memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, dalam konteks ini dalam menerima bantuan dari negara. Negara mensubsidi program sertifikasi ini, sehingga program ini dijalankan semaksimal mungkin yaitu pemerintahan desa memberikan fasilitas dan mengadakan pungutan yang tentunya disetujui oleh masyarakatnya. Tujuannya jelas, yaitu agar setiap warga negara, dalam konteks sertifikasi ini memperoleh kepastian hak kepemilikan atas sumber daya alam. Bukan hanya menciptakan keadilan sosial untuk masyarakat, namun pemerintahan juga mempunyai tendensi dalam memperbaiki administrasi, terutama dalam bidang pertanahan yang kerap kali memberikan kerugian secara finansial bagi aktor pemerintahan desa.

Sertifikasi tanah yang didatangkan oleh kepala desa dimaknai juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan penjelasan kepala desa, bahwa pada dasarnya sertifikasi ini sebenarnya merugikan desa, karena pembuatan segala aktivitas jual beli tanah, pengurusan pembuatan akta tanah hingga sertifikat merupakan pendapatan resmi desa, sedangkan sertifikasi massal ini secara langsung mengurangi pendapatan desa. Pengambilan program ini diartikan sebagai bentuk mendahulukan kepentingan masyarakat luas dibandingkan keuntungan golongan atau kelompok saja.

A. Orientasi Ekonomi

Orientasi ekonomi terdapat dua pandangan pertama untuk struktur pemerintahan dan kedua untuk masyarakat umum. Pada kasus ini yang menjadi fokus adalah pemerintah desa mengalami masalah keuangan yang berulang-ulang setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya tanah *gendom* atau tanah tak bertuan. Konteks tanah tak bertuan ini adalah secara tagihan pajak ada, namun letak tanah dan pemiliknya tidak jelas. Meskipun permasalahan di desa merupakan masalah yang disebabkan kesalahan administrasi desa, namun hal yang perlu dipahami adalah permasalahan ini setiap tahunnya melibatkan warga desa yang harus membayar pajak tanah yang bukan tanggungannya. Maka dari itu, pemerintah desa menggunakan PTSL sebagai salah satu instrumen dalam menyelesaikan masalah ekonomi pemerintah desa. Besaran kerugian yang ditanggung oleh pemerintahan desa cukup besar. Meskipun masing-masing informan memberikan jawaban yang

berbeda, namun kerugian itu berkisar antara Rp 15.000.000,- hingga Rp 30.000.000,-.

“untuk melangkah ke depane supaya pembayaran pajak segera tuntas. Sebelume niku kan tanah yang di desa sini itu ada yang katakan tidak bertuan, ada namanya tapi tidak ada yang mengakuinya. tanahnya ada, terus SPPTnya ada, tapi katanya ‘oh aku ga punya tanah ini’, terus untuk menertibkan diadakan PTSL ini. Pernah setiap tahunnya masalah pembayaran pajak itu gak bisa tuntas (Desa membayar kekurangan) kurang lebih 17-18” (Coding : W-MTD-03).

“Sebab dari dulu, pemerintahan desa itu yang namanya pajak, itu pemerintahan desa itu per tahun min sekitar 15 sampai 20 juta. Dadi dengan adanya sertifikat ini, agar bisa mengetahui ya per orangnya itu. Sehingga ada tanah yang dari dulu itu per dusun ada yang tanah itu tidak bertuan. Tanah itu tidak bertuan istilahnya tidak mau memajakkan tanahnya” (Coding : W-ST-07)

Hasil wawancara dengan Pak Tukiyat dan Pak Alex di atas, menunjukkan adanya permasalahan ekonomi pemerintahan desa karena adanya tanah *gendom* atau tak bertuan dan tidak adanya peta bidang terbaru. Karena menurut pak Budi selaku kepala desa, menunjukkan bahwa peta bidang terakhir dibuat pada tahun 1960 sehingga batas tanah, luas tanah kepemilikan tanah mengalami perubahan.

“ya, dari dulu di lapangan, karena memang apa, ternyata tanah dimasyarakat itu sudah tidak akurat lagi. Kan pengepulan/penggempuran itu 1960. Lah enggeh, jadi data yang ada di Letter C atau pungun pethok D nggeh, kalau orang desa itu mengatakan bahwa itu pethok D, itu letter C itu 1960. Jadi sudah turun temurun, sudah ke anak dan cucu dan sebagainya” (Coding : W-MTD-02)

“dan dari pajek ini mas, saya juga pengen menertibkan pajak. Pajak itu sementara banyak SPPT yang sudah tidak diakui warga. Jadi desa itu setiap tahun harus nekori pajek itu 12-17,5 juta pertahun” (Coding : W-KP-06)

“yowes deso emboh nekori mas, nekori kemarin saya 27 juta. Tahun ini lo kemarin 27 juta. Pokok e pitu likur juta, selawe, ngunu iku (Yasudah, Desa kudu bagaimana lagi selain mengganti rugi, Rugi Rp 27.000.000,- saya kemarin. Maksudnya tahun ini, pokoknya dua puluh tujuh juta berapa begitu). (Coding : W-KP-02)

Narasi yang disampaikan oleh pak Budi menunjukkan bahwa PTSL ini mencoba memberikan pengaruh positif pada pemerintahan desa agar tidak kehilangan uang yang dikarenakan tanah obyek pajak yang fiktif.

B. Orientasi Ideologis

Terdapat faktor yang menggerakkan aktor pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pengambil keputusan dihadapkan pada ideologis-ideologis negara. Salah satunya adalah ideologis Pancasila yang bergerak pada pemahaman tentang keadilan sosial. Keadilan sosial diwujudkan dengan cara mendistribusikan program pemerintah hingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas, terlepas dari masyarakat tersebut menolak atau menerima, aktor pemerintahan desa melakukan segala tindakannya secara terbuka. Pada kasus

kepala desa, hal yang menjadi faktor penggerak adalah untuk mendapatkan kesan sebagai pemimpin yang baik.

“orientasinya saya pengen meningkatkan ekonomi masyarakat. Disamping itu saya pengen punya tinggalan yang baik lah. Tapi orientasinya saya memang lebih ke ekonomi” (Coding : W-ST-02)

Dari penuturan di atas menunjukkan bahwa dari awal Pak Budi selaku aktor pemerintahan desa mempunyai landasan dalam mendatangkan program ini. Uraian pak Budi ini diperkuat dengan jawaban Pak Tariyadi selaku salah kepala dusun di Desa Sumberoto :

“dari dulu sebenarnya kan sebelum pemerintahan pak Budi itu sebenarnya sudah berharap, saya terutama secara pribadi. Nah salah satu mungkin bentuk komitmen dengan Pak Kades dulu kan saya salah satu timnya untuk pencalonannya yang kedua. ‘besok lek wes dadi ayo PRONA(program sertifikasi sebelum PTSL) didekek nang deso’, jadi intinya memang Pak Budi sanggup ya ini komitmen lah ke masyarakat” (Coding : W-ST-06)

Selain itu, aktor pemerintahan seperti pak Alex dan Pak Tukiyat juga memberikan pendapat bahwa :

“tujuan utamanya ya untuk mensejahterakan masyarakat” (Coding : W-ST-06)

“iya untuk mempermudah warga, yang pertama itu warga ini biar gak diombang-ambing orang yang pintar, gitu aja. Jadi istilahnya orang yang kurang pengetahuan seperti saya ini jangan sampai diperjualbelian oleh orang yang pintar” (Coding : W-HP-07)

Secara ideologis adanya program PTSL ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat terlindungi secara hukum atas kepemilikan tanahnya. Selain itu, menjalankan keadilan sosial terutama dalam hal memberikan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari asumsi bahwa sertifikat tanah merupakan alternatif untuk masyarakat dalam memperoleh dana tambahan dalam mencukupi kebutuhan ekonominya.

2. Werkrational Action

Tindakan sosial yang diambil merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan nilai etis atau tidak etis dalam masyarakat selama tujuan aktor tercapai. Rasionalitas yang diusung adalah rasionalitas individu. Sertifikasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh kepala desa dalam memperkuat basis politiknya guna memenangkan pemilihan kepala desa. Menumpang pada program pemerintah sebenarnya bukanlah hal yang etis, karena mencederai upaya pemerintah yang berupaya menciptakan keadilan sosial untuk masyarakatnya. Kondisi ini tentu saja disadari oleh lawan politik dari kepala desa yang menjabat, karena dirasa menunggangi kepentingan umum sebagai penguatan basis politiknya.

Tendensi politik ini dirasa sah karena secara tersirat disampaikan dalam sambutan maupun dalam wawancara yang diparafrasakan, yaitu *“jika tanpa perjuangan dia belum tentu program ini bisa masuk ke Desa Sumberoto”*. Secara tersirat tujuan dari kepala desa ini jelas menunjukkan bahwa program ini ada karena

peran aktif kepala desa dan timnya, yang dari tindakan ini menunjukkan sikap kepala desa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga layak untuk menjabat di periode selanjutnya. Tindakan ini tak jarang memunculkan konflik antara pihak yang terlibat maupun pihak yang melihat tindakan ini. Kasus sertifikasi ini memunculkan konflik antara pihak aktor pemerintahan desa dengan lawan politiknya.

Program PTSL bukanlah program yang hadir di tahun ini saja, sebelumnya program ini telah berjalan dan berganti-ganti nama. Pengaruh dari program sertifikasi yang cukup besar kerap kali dikaitkan dengan kepentingan pribadi. Salah satunya kepala desa Sumberoto yang akan bertarung di tahun 2019 sebagai salah satu calon kepala desa periode 2. Selain kepentingan pribadi, upaya kepala desa mengangkat kepentingan kelompoknya, yaitu mencatut salah satu mencatut nama calon pemimpin negara yang pada tahun 2019 kembali bertarung dalam pemilihan presiden.

“iya, tahun 2017 – 2018, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sehingga kita memang ikut, dan memang kita berupaya, dan itu menjadi cita-cita saya bahwa nanti saya kalau jadi kepala desa ingin punya sertifikat semua saya, di desa Sumberoto ini” (Coding : W-ST-02)

“Berangkat dari situ kulo mikir, lek wong sumberoto iki due sertifikat kabeh. Tapi ya Alhamdulillah nggeh, begitu saya jadi kepala desa terus meringunu mengajukan ndilalah lakok kesampaian pak Jokowi presiden kita itu memberikan program PTSL. Kemudian nopo niku, pendaftaan tanah sertifikat lengkap, sak deso niku dikei kabeh” (Coding : W-ST-02)

Politisasi program ini dibantah oleh BPN dimana keberadaan program ini dipolitisi oleh pemerintahan desa. Kepala BPN yang hadir dalam penyerahan sertifikat mengatakan bahwa Proyek ini bukan proyek pak Jokowi, dan juga bukan proyek kepala desa melainkan memang proyek pemerintah yang dijalankan desa (Parafrasa dari coding : W-TP-02). Berdasarkan pada kondisi ini menunjukkan bahwa adanya upaya dari aktor pemerintahan desa termasuk kepala desa dan tim suksesnya.

Tindakan yang dilakukan kepala desa ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ada muatan rasionalitas untuk mencapai tujuan, yaitu untuk terpilih lagi dalam pemilihan kepala desa selanjutnya. Tindakan yang diambil mengaburkan nilai-nilai yang ada dalam pengambilan sebuah kebijakan tanpa adanya tendensi pribadi atau golongan dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat

3. Affectual Action

Tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh emosi dan kepura-puraan aktor, sehingga secara tidak langsung susah untuk dipahami dan mengaburkan sifat rasionalitasnya. Sertifikasi yang dilakukan oleh aktor pemerintahan desa ini sukar dipahami karena tendensi politik bercampur aduk dengan tendensi ekonomi. Pengambilan program sertifikasi tanah ini tidak terlepas dari adanya pengalaman yang emosional dari kepala desa beserta aktor kepala desa tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus legalitas kepemilikan tanahnya. Sertifikasi

masal menjadi salah satu jalan agar permasalahan legalitas ini rampung, sehingga akan mempermudah masyarakat dalam permasalahan ekonominya, yaitu dengan cara menggadaikan sertifikat tanahnya, seperti pengalaman kepala desa atau aktor pemerintahan lainnya.

“saya sudah ngalami sendiri. Saya itu tahun 2009 ngurus sertifikat itu habisnya saja satu bidang itu, gak terlalu luas pada waktu itu, saya tiga bidang itu 172 meter nggeh, 180 meter, sama 700 eh 672 itu saja habis Rp 30 juta. Bayangkan kalau sekarang masyarakat seperti itu, kan gak ngurus-ngurus akhirnya. Ekonomi masyarakat tidak akan meningkat nanti” (Coding : W-CS-02)

“saya itu balik nama 10 juta, soale kalkulasine akeh, diitung harga tanahnya berapa kena pajek 5%. Semakin mahal harga tanahnya ya semakin mahal harga sertifikatnya.” (Coding : W-CS-01)

Dari dua uraian di atas menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurus tanah yang mahal. Alasan ini yang melatar belakangi masuknya program PTSL ke Desa Sumberoto. Pengalaman dari Kepala Desa dan aktor negara lain mengansumsikan setiap orang yang mempunyai sertifikat akan menggadaikannya untuk sebagai dana tambahan.

“saya hanya kepingin ekonomi masyarakat itu bagaimana supaya ada peningkatan. Dan yang kita pikirkan itu bukan, lek kepala desa itu kan biasanya pokok e mbangun mbangun dan lain sebagainya, tapi ekonomi pemberdayaan masyarakat ini sangat perlu kita rubah. Wisata kan tujuannya juga pembedayaan masyarakat, ini juga pemberdayaan masyarakat.” (Coding : W-HP-02)

“Yang kedua, bagaimana supaya status tanah itu jelas. Itu nggeh, yang pertama menghindari konflik, yang kedua status tanah jelas ini milik siapa. Yang ketiga nanti memudahkan untuk desa, untuk lebih menertibkan pajak, gitu. Terus yang keempat itu membantu masyarakat untuk bagaimana nanti meningkatkan ekonominya, bisa mengakses ke bank secara mudah, buat jaminan.” (Coding : W-ST-02)

4. Traditional Action

Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sadar dilakukan. Kondisi ini tidak terlepas dari pengalaman si aktor. Tidak dapat dipisahkan dari *Affectual Action* karena pada dasarnya kedua tindakan sosial ini rasionalitasnya bersifat kabur. Kaburnya rasionalitas ini dikarenakan adanya faktor kebiasaan dan emosional. Kebiasaan kepala desa yang menggunakan surat legal sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman Lembaga keuangan.

Pada tahapan ini ada yang luput, untuk mereka yang mempunyai pendapatan tetap, hal ini dirasa rasional, namun bagi masyarakat yang hanya bergantung pada hasil bumi yang terkadang tidak menentu perlu mendapat perhatian khusus. Kedua kondisi ini berbeda sehingga hal yang biasa menurut kepala desa belum tentu hal yang biasa bagi orang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tindakan Sosial Aktor Pemerintahan Desa dalam Sertifikasi Tanah (Studi pada Pemerintahan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang) yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan tindakan sosial Instrumental. Aktor pemerintahan desa melakukan tindakan tersebut dengan berbagai orientasi. Tujuannya jelas, yaitu agar setiap warga negara, dalam konteks sertifikasi ini memperoleh kepastian hak kepemilikan atas sumber daya alam. Bukan hanya menciptakan keadilan sosial untuk masyarakat, namun di sisi lain pemerintahan juga mempunyai tendensi dalam memperbaiki administrasi, terutama dalam bidang pertanahan yang kerap kali memberikan kerugian secara finansial bagi aktor pemerintahan desa. Pengambilan program sertifikasi ini diartikan sebagai bentuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan keuntungan golongan atau kelompok saja.

Di sisi lain, terdapat tindakan sosial yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan nilai etis atau tidak etis dalam masyarakat selama tujuan aktor tercapai. Rasionalitas yang menggerakkan pemerintah desa adalah rasionalitas individu dan kelompoknya. Sertifikasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh kepala desa dalam memperkuat basis politiknya guna memenangkan pemilihan kepala desa. Menumpang pada program pemerintah sebenarnya bukanlah hal yang etis, karena mencederai upaya pemerintah yang berupaya menciptakan keadilan sosial untuk masyarakatnya. Kondisi ini tentu saja disadari oleh lawan politik dari kepala desa yang menjabat, karena dirasa menunggangi kepentingan umum sebagai penguatan basis politiknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang makna perceraian dan tindakan sosial sertifikasi tanah yang dilakukan oleh aktor pemerintah desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo Malang tahun 2019, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah bahwa sebaiknya program sertifikasi ini diikuti dengan adanya program yang mendorong masyarakat untuk mengintensifikan tanahnya. Perkembangan teknologi pertanian dan memperbaiki kebudayaan masyarakat terutama dalam hal pertanian perlu ditingkatkan. Masyarakat bukan hanya diperkenalkan cara untuk mendapatkan kapital, namun masyarakat diarahkan ke bidang yang dapat menyokong kebutuhan mereka. Di sisi lain, penyelesaian sertifikasi harus diselesaikan pada tingkat lokal dahulu sebelum diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini dapat dikaji lebih dalam dipenelitian selanjutnya sehingga memunculkan dialektika keilmuan terutama dalam penelitian sosiologis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding atau komparatif dalam penelitian selanjutnya, karena pada dasarnya penelitian ini hanya menangkap satu momen saja dan perlu adanya kajian tandingan sehingga penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi tanah secara massal dan aktor pemerintahan desa semakin beragam dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Dari Bounded System ke Borderless Society : Krisis Metode Antropologi dalam memahami Masyarakat Masa Kini*. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia Vol 30 No 2 tahun 2006 hlm 185-192
- Ali, Daniel Ayalew. Deininger, Klaus. Holden, Stein. Zevenbergen, Jaap. 2008. *Rural Land Certification in Ethiopia : Process, Initial Impact, and Implications for Other African Countries*. Dalam Jurnal World Development Vol. 36, No. 10, Hlm 1786-1812.
- Amaratunga, Dilanthi, dkk. 2002. Quantitative and Qualitative Research in the Built Environment: Application of “mixed” Research Approach. Dalam Jurnal Work Study, Volume 51 No 1 tahun 2002. Pp 17-31.
- Andreanto, Galih. 2014. *Bias Arah Reforma Agraria Jokowi-Jusuf Kalla*. Dalam Jurnal Landreform Edisi II/Desember 2014. Hlm 55-71.
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities : Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arizona, Yance. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta : STPN Press
- Aprianto, Tri Chandra dan Amir Mahmud. 2017. *Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad Mengoreksi Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Makalah dalam Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017 dengan Tema Reforma Agraria di Luar Kawasan Hutan : Peluang dan Tantangan. Diadakan oleh Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), SAINS, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Samdhana Institute di IICC Bogor, 23-24 Oktober 2017
- Bachriadi, Dianto. 2007. Reforma Agraria untuk Indonesia. Dalam Laman <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/11/DBReforma-Agraria-untuk-Indonesia.pdf> . Tulisan dan Bahan Diskusi dalam Pertemuan Organisasi-Organisasi Rakyat Se-Jawa di Magelang pada tanggal 6-7 Juni 2007.
- Bachriadi, Dianto dan Wiradi, Gunawan. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung : Agrarian Resource Centre (ARC) Bina Desa dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Bernstein, Henry, dkk. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta : STPN Press
- Bernstein, Henry. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. London : Kumarian Press

- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya edisi Kedua*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group
- Breman, Jan dan Wiradi, Gunawan. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa : Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa menjelang Akhir Abad Ke-20*. Jakarta LP3ES
- Chinigo, Davide. 2015. *The Politics of Land Registration in Ethiopia : Territorialising State Power in The Rural Milieu*. Dalam Jurnal African Political Economy, Vol 42:114, Halaman 174-189
- Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California : Sage Publications.
- Cresswell, John W. 2018. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan Edisi ke 3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Groenewald, Thomas. 2004. A Phenomenological Research Design Illustrated. Dalam Jurnal International Journal of Qualitative Methods volume 3 edisi 1 April 2004
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Malang : UMM Press
- Indiraharti, Novina Sri. 2006. *Sertifikasi Tanah dan Permasalahannya*. Dalam Jurnal Ilmiah LEMDIMAS Volume 6 No 2 November 2006. Hlm 50-56
- Ismail, Nurhasan. 2012. *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*. Dalam jurnal RechtsVinding Media pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 1 Januari-April. Hlm 33-52
- Kantor Staf Presiden, 2016-2019. *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*. Jakarta
- Khadka, Kamal, Chaudhary, Pashupati dan Gartala, Hom Nath. 2014. *Land Redistribution and Reutilization in the Context of Migration in Rural Nepal*. Dalam Jurnal Land 2014 Vol 03, Hlm 541-556
- Lincoln, Yvonna S. Dan Denzin, Norman K. 2005. *The Sage Handbook Of Qualitative Research Third edition*. California : Sage Publications Inc
- Lucas, Anton dan Warren, Carol. 2013. *The Land, The Law and The People*. Dalam Jurnal Land for the People : The State and Agrarian Conflict in Indonesia. Amerika : Ohio University Press
- Maladi, Yanis. 2013. *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*. Dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 1 Februari 2013. Hlm 27-41
- Mardiana, Lilis, dkk. 2011. *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan : Latar Belakang, Kerangka Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*. Jakarta : LIPI dan PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI)
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : PolGov UGM
- Migdal, J. S. (2004). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Dalam Jurnal Bhumi, Vol. 4 No. 1 Bulan Mei.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Amerika : Pearson.
- Neuman, W. Lawrence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta Barat : PT Indeks.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Permatasari, Widya Ayu. 2018. *Tesis PUBLIC-PRIVATE: Relasi Negara-Masyarakat dalam Ranah Rumah Tangga di Arena Kontradiksi*. Universitas Indonesia.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform : Dari Masa ke Masa*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Rachman, Noer Fauzi. 2016. *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria : Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta : Insist Press
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta : Insist Press
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. *Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi : Gaung Besar di Pinggiran Jalan*. Edisi Peluncuran Catakun 2017.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ritzer, George. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Depok : Raja Grafindo Persada
- Shohibuddin, Mohamad. 2016. *Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa : Perspektif Agraria Kritis*. Dalam Jurnal MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 21 No. 1 Halaman : 1-33
- Shohibuddin, Mohamad. 2016. *Jangan Persempit Makna Reforma Agraria !*. Tulisan dalam Kolom Majalah Gatra 3 Februari 2016. Hlm 60-61
- Sekeris, Petros G. Dan Luca Giaacomo De. 2012. *Land Inequality and Conflict Intensity*. Dalam Juranl Public Choice (2012) 150, hlm 119-135.
- Sucianti, Nadya. 2004. *Land Reform Indonesia*. Dalam Lex Jurnalica Vol 1 No 3 Agustus 2004
- Susanto, Bronto. 2014. *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10 No 20 Hal 76-82 Agustus.
- Sutedi, Andrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tim Penulis Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2009. *Menuju Demokratisasi Pemetaan, Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif di Indonesia*. Bogor : Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif dan Yayasan TJFA

- Thentteh, E.O dan Omirin, M.M. 2105. *Land Registration Within the Framework of Land Administration Reform in Lagos State*. Dalam Jurnal Pacific Rim Property Research Journal, Vol 21. No. 2 halaman 161-177.
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang pengelolaan sumber daya alam
- Undang-Undang No 02 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa
- Undang-Undang No 06 tahun 2014 tentang pemerintahan desa
- Vollenhoven, C. Van. 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya* terjemahan Soewargono. Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT). Yogyakarta : STPN Press
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta : STPN Press
- Wiradi, Gunawan, dkk. 2009. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah Dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta : STPN dan Sajogyo Institute
- Yayasan Wilwatikta Sripkala Nusantara. 2015. *Sensus Rumah Tangga dan Sensus Kemiskinan di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang*. Malang
- Warren, Carol. 2013. *Legal Certainty for Whom ? Land Contestation and Value Transformations at Gili Trawangan, Lombok*. Dalam Jurnal Land for the People : The State and Agrarian Conflict in Indonesia. Amerika : Ohio University Press
- The World Bank. 2014. *Agricultural Land Redistribution and Land Administration in Sub Saharan Africa : Case Studies of Recent Reforms* Editor Byamugisha, Frank F. K. Amerika : Washington, D.C.
- <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr> diakses tanggal 13 Oktober 2018